BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1. Analisis Sistem Yang Berjalan

Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah memiliki Prosedur sebagai berikut :

1. Prosedur 1 yaitu Pengelolaan data pembayaran pajak, yang memiliki proses Penerimaan data pembayaran pajak, Pemberian validasi pada data SSPD dan Pembuatan STS .
    1) Proses Pemrosesan Validasi SSPD, di awali dari bagian Pendapatan menyerahkan SSPD kepada bagian Bendahara Penerima. Setelah bagian Bendahara Penerima menerima SSPD, SSPD tersebut di validasi sebagai tanda bukti untuk wajib pajak bahwa Wajib Pajak tersebut sudah membayar pajak yang sudah ditentukan. SSPD yang sudah di validasi diberikan kepada rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak, rangkap ke-2 untuk bagian Bendahara Penerima, rangkap ke-3 untuk bagian Pendapatan dan rangkap ke-4 untuk bagian P2O untuk di arsipkan.
    2) Pembuatan STS dan Slip Setoran Wajib Pajak, dari SSPD yang sudah di validasi, bagian Bendahara Penerima membuat STS dan Slip Setoran. STS dan Slip Setoran selesai dibuat selanjutnya STS dan Slip Setoran tersebut diberikan kepada wajib pajak untuk pembayaran pajak ke Bank, di Bank STS dan Slip Setoran tersebut divalidasi. Setelah proses pemvalidasian selesai selanjutnya Bank mengambil

rangkap ke-1 Slip Setoran dan rangkap ke-4 STS yang sudah divalidasi untuk di arsipkan. Rangkap ke-2 Slip Setoran dan rangkap ke-1, 2, 3 dan 5 STS yang sudah divalidasi diberikan lagi ke Wajib Pajak dan Wajib Pajak mengembalikan STS dan Slip Setoran yang sudah divalidasi oleh Bank ke bagian Bendahara Penerima.

3) Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi, Wajib Pajak menerima STS dan Slip Setoran yang sudah divalidasi oleh Bank untuk dikembalikan lagi ke bagian Bendahara Penerima. Dari bagian Bendahara Penerima STS dan Slip Setoran diserahkan kepada rangkap ke-2 Slip Setoran dan rangkap ke-3 untuk Kas Daerah untuk diarsipkan. Rangkap ke-2 STS untuk bagian Bendahara Penerima, rangkap ke-1 STS untuk bagian Akuntansi dan rangkap ke-5 STS untuk Perbendaharaan untuk di arsipkan.

2. Prosedur 2 yaitu Pelaporan, yang memiliki proses Pembuatan Laporan Penerimaan dan Pembuatan Laporan Penyetoran

1) Proses Pembuatan Laporan Penerimaan, SSPD yang telah divalidasi oleh Bagian Bendahara Penerima diproses untuk pembuatan Laporan Penerimaan. SSPD yang telah divalidasi diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima. Dari proses pembuatan Laporan Penerimaan tersebut maka terbuatlah dokumen Laporan Penerimaan dan akan diarsipkan pada Rangkap ke-1 oleh Kas Daerah, Rangkap ke-2 oleh Bagian Bendahara Penerima, Rangkap ke-3 oleh Bidang Pendapatan,

Rangkap ke-4 oleh Bidang P2O dan Rangkap ke-5 oleh Bidang Akuntansi.

2) Proses Pembuatan Laporan Penyetoran, oleh Bendahara Penerima dari Laporan Penerimaan diproses untuk pembuatan Laporan Penyetoran. Selesai pemrosesan Laporan Penyetoran, Laporan Penerimaan diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima dan Laporan Penyetoran akan diarsipkan pada Rangkap ke-1 oleh Kas Daerah, Rangkap ke-2 oleh Bagian Bendahara Penerima, Rangkap ke-3 oleh Bidang Pendapatan, Rangkap ke-4 oleh Bidang P2O dan Rangkap ke-5 oleh Bidang Akuntansi.

4.1.1. Analisis Dokumen

Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah ini ada beberapa dokumen yang digunakan. Dokumen – dokumen yang mendukung sistem tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

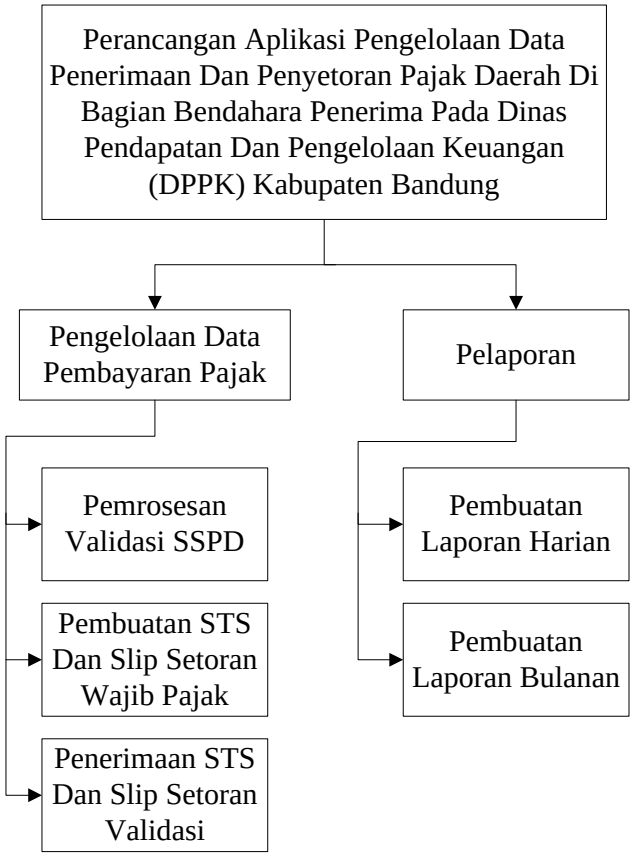
Tabel 4.1 Analisis Dokumen

No	Nama Dokumen	Fungsi
1.	Slip Setoran	Tanda bukti pembayaran pajak dari Bank
2.	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)	Tanda bukti pembayaran dari Bendahara Penerima untuk wajib pajak dan diserahkan kepada Wajib Pajak, Bendahara Penerima, Bidang Pendapatan dan Bidang P2O.
3.	STS (Surat Tanda Setoran)	Tanda Bukti Setoran dari Bendahara Penerima diserahkan kepada bagian Bendahara Penerima itu sendiri, bagian Akuntansi, Kas Unit Organisasi, Kas Daerah, Bank, dan Dinas Pendapatan
4.	Laporan Penerimaan	Dibuat untuk melaporkan transaksi penerimaan pajak yang terjadi pada bagian Bendahara Penerima diserahkan kepada bagian Bendahara Penerima itu sendiri, Kas Daerah, bagian pendapatan, bagian Akuntansi dan bagian P2O
5.	Laporan Penyetoran	Dibuat untuk melaporkan transaksi penerimaan pajak yang terjadi pada bagian Bendahara

		Penerima diserahkan kepada bagian Bendahara Penerima itu sendiri, Kas Daerah, bagian pendapatan, bagian Akuntansi dan bagian P2O

4.1.2. Analisis Prosedur Yang Sedang Berjalan

Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini terdapat beberapa prosedur yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat melalui bagan struktur proses yang berjalan dibawah ini :

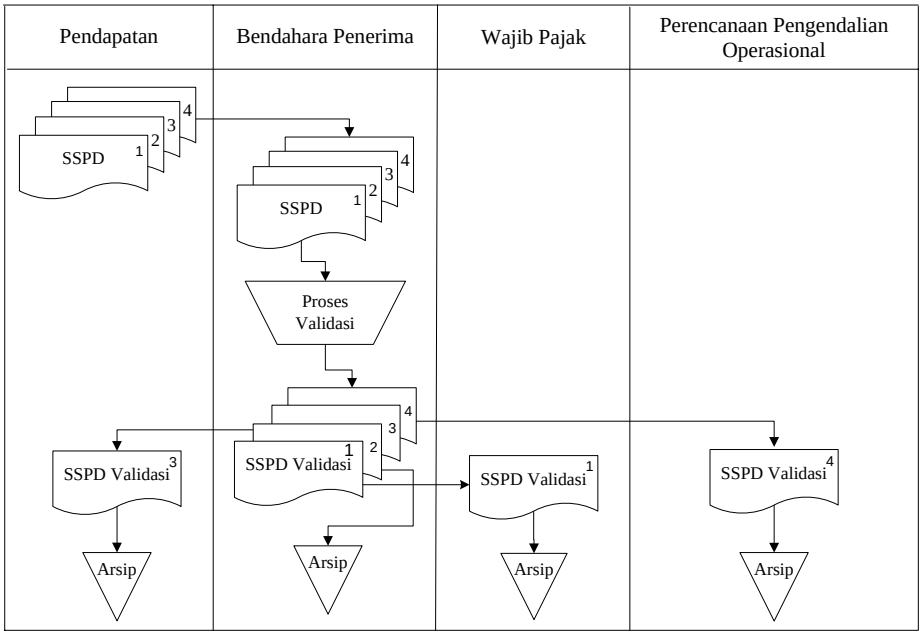


Gambar 4.1 Strukur Proses Yang Berjalan Pada Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

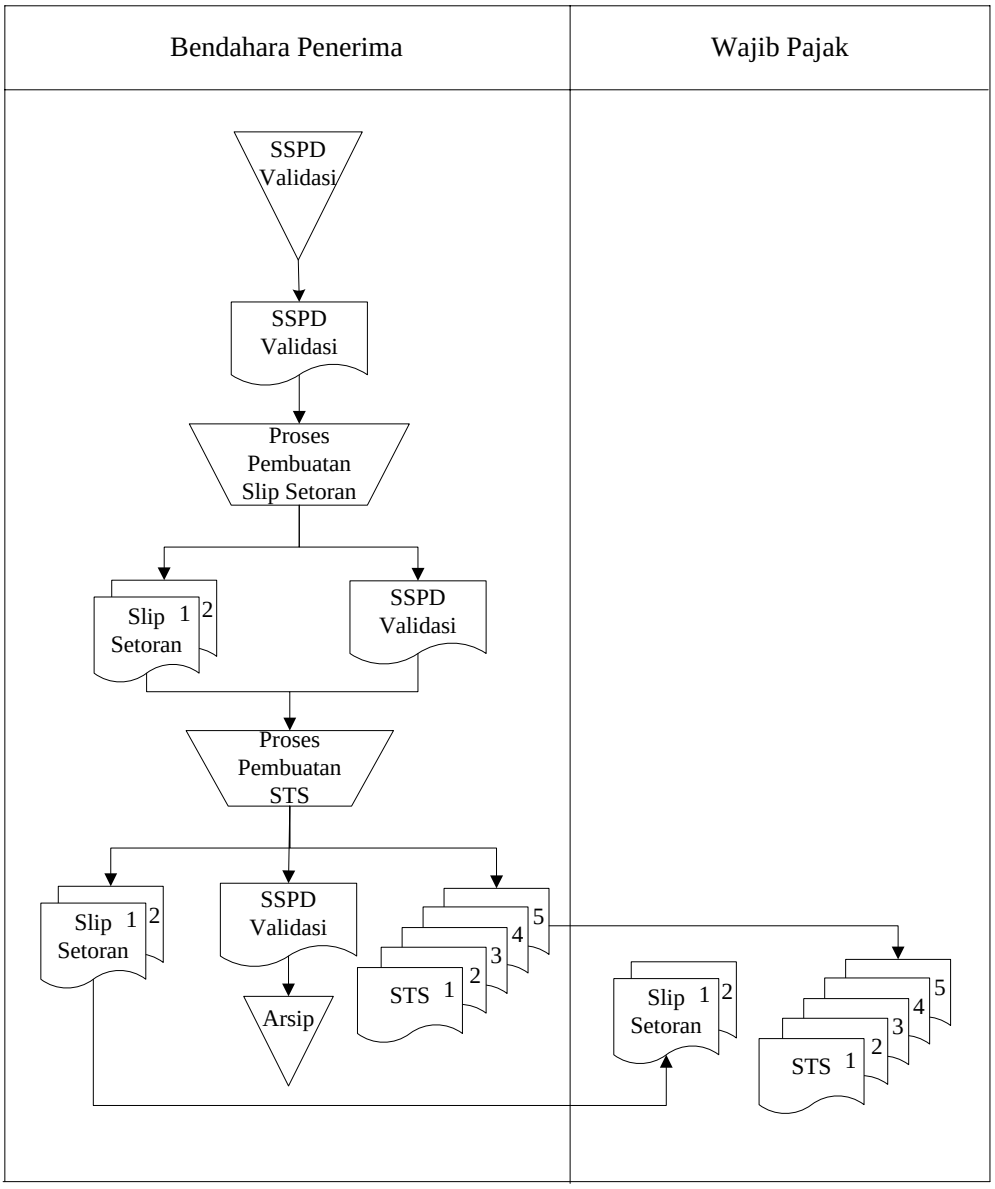
4.1.2.1. Flow Map Yang Sedang Berjalan

Aliran dokumen yang terjadi pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini dapat dilihat dari gambar flowmap dibawah yang dibuat berurutan berdasarkan prosedur dan proses yang berjalan

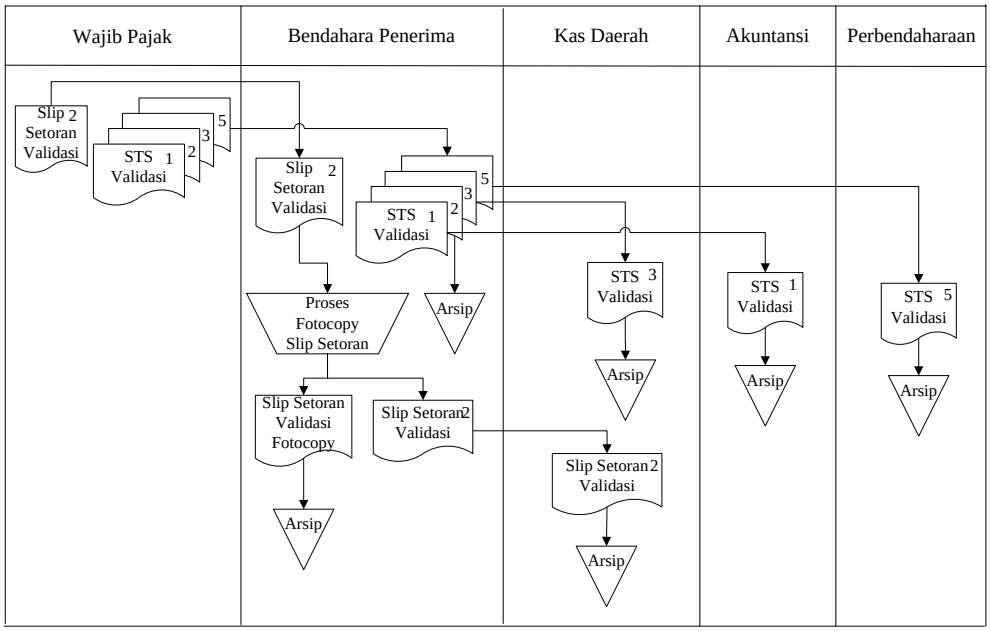
I. Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak



Gambar 4.2 Flowmap Pemrosesan Validasi SSPD Yang Sedang Berjalan

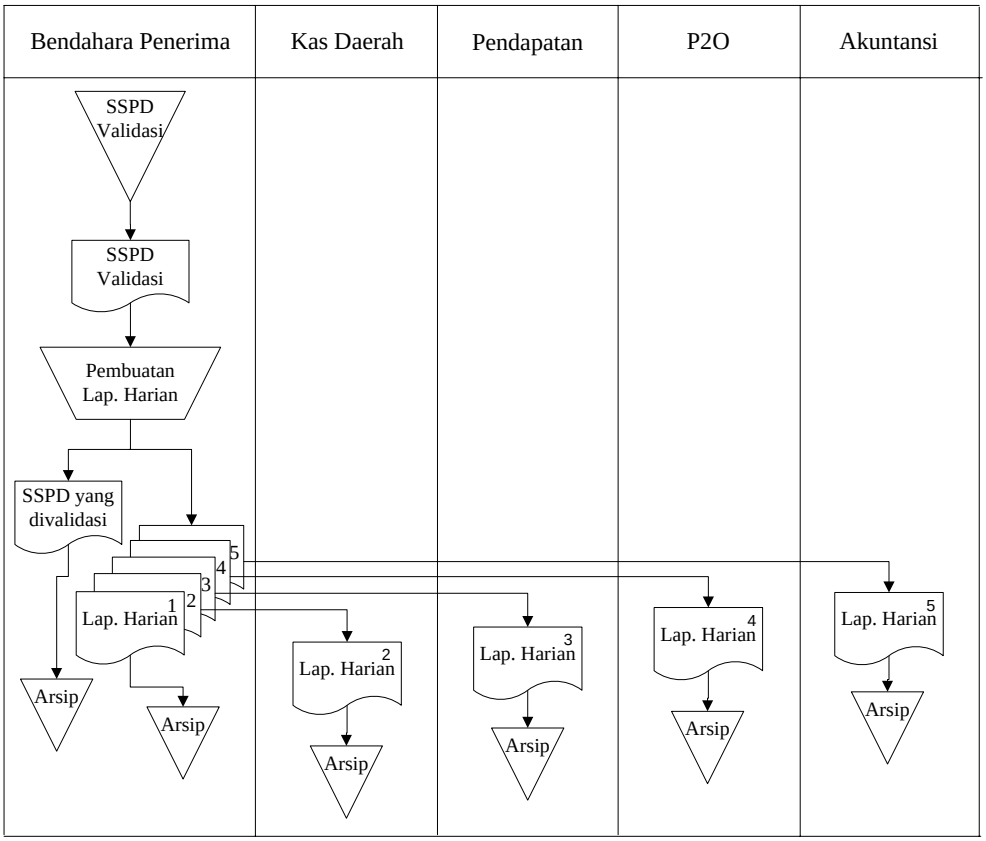


Gambar 4.3 Flowmap Pembuatan STS dan Slip Setoran Wajib Pajak Yang Sedang Berjalan

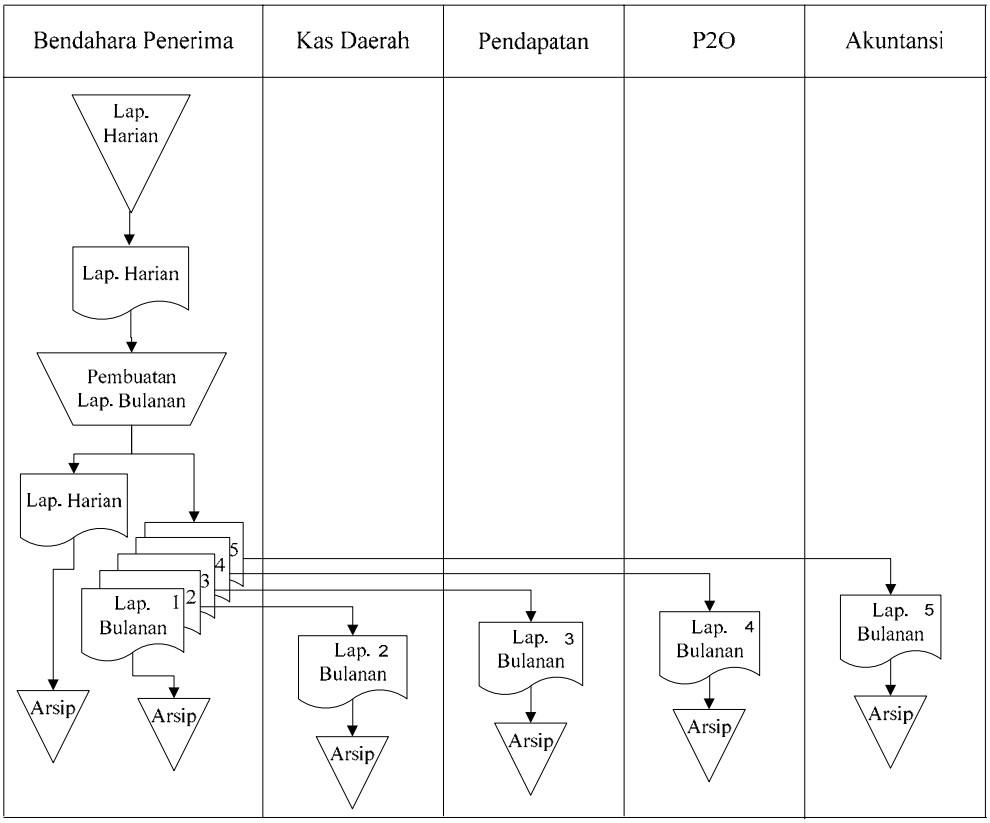


Gambar 4.4 Flowmap Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi Yang Sedang Berjalan

II. Prosedur Pelaporan



Gambar 4.5 Flowmap Pembuatan Laporan Harian Yang Sedang Berjalan

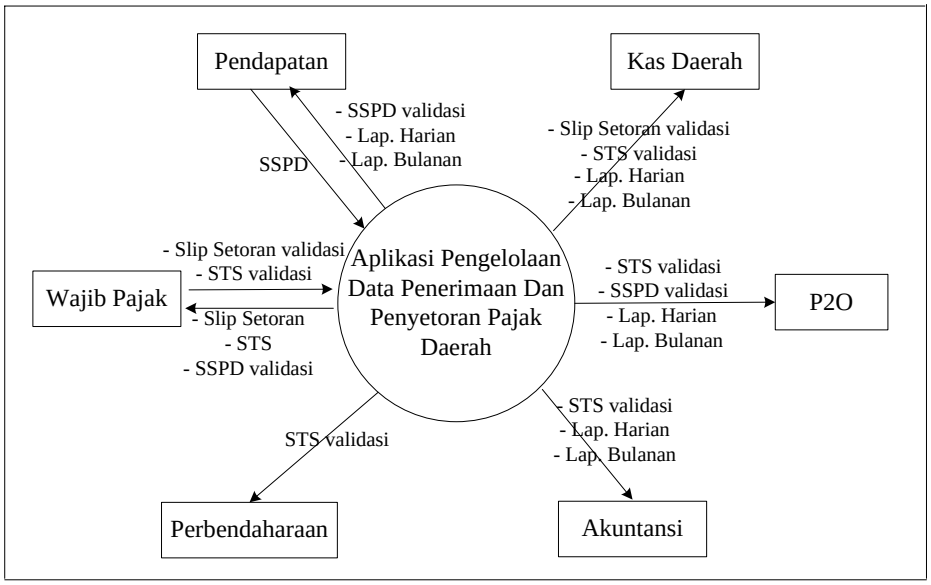


Gambar 4.6 Flowmap Pembuatan Laporan Bulanan Yang Sedang Berjalan

4.1.2.2. Diagram Konteks

Dibawah ini merupakan Diagram Konteks dari sistem yang sedang berjalan di Bagian Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Diagram Konteks / DFD Level 0

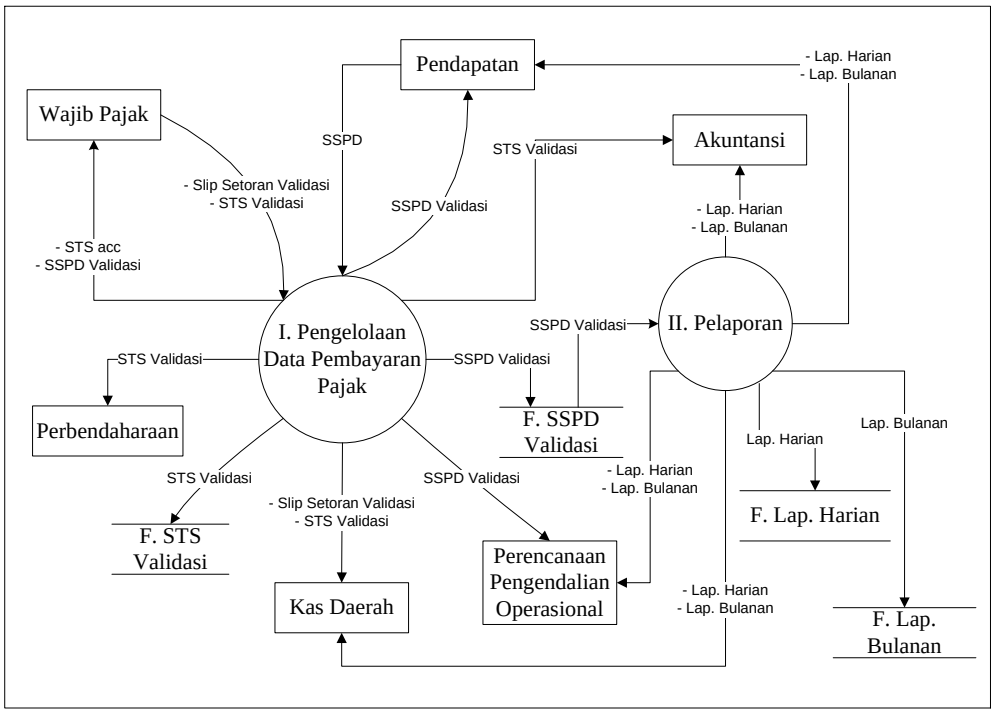


Gambar 4.7 Diagram Konteks / DFD Level 0 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Sedang Berjalan

4.1.2.3. Data Flow Diagram

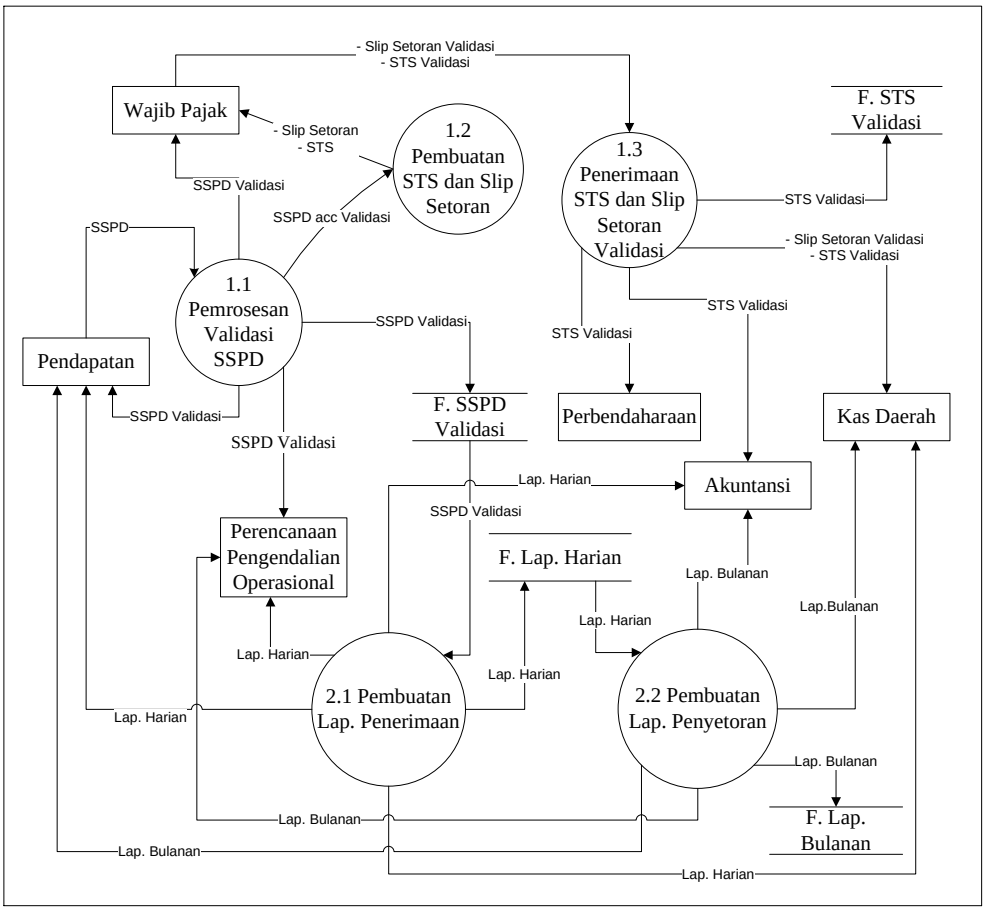
Setelah pembutan Diagram Konteks, maka dari setiap prosedur Diagram Konteks tersebut diturunkan menjadi DFD Level 1 dan DFD Level 2. Dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :

DFD Level 1



Gambar 4.8 DFD Level 1 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Sedang Berjalan

DFD Level 2



Gambar 4.9 DFD Level 2 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang sedang Berjalan

4.1.3. Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem yang selama ini ada sebetulnya sudah berjalan namun hanya sebatas input data, masih banyak penambahan dan perubahan yang perlu dilakukan pada sistem tersebut hingga dapat menghasilkan sebuah Aplikasi sebagaimana yang diharapkan dapat lebih lengkap, efektif, efesien dan terkomputerisasi semuanya hingga akhir pada proses pencetakan.

Sistem yang ada hanya sebatas input data itu menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel yang masih banyak sekali panambahan dan perubahan pada aplikasi tersebut, sehingga dapat tercipta sebuah Aplikasi yang sebagaimana diharapkan. Penambahan dan perubahan yang perlu dilakukan pada Aplikasi ini antara lain perlu adanya sebuah proses yang sistematis sehingga aplikasi yang ada bisa melakukan pendataan, penghitungan dan pemrosesan lainnya pada beberapa data yang telah terinputkan. Sehingga yang tercipta tidak akan ada lagi proses manual setelah data yang telah terinputkan kedalam aplikasi yang ada dan bisa menghasilkan sebuah proses data yang lebih baik hingga terciptanya sebuah sistem informasi sebagaimana yang diharapkan.

Sistem tersebut menggunakan perangkat lama dan spesifikasi yang masih rendah, sehingga belum bisa menunjang sebuah aplikasi data yang bisa menghasilkan data yang lebih baik. Yang sekarang ini ada adalah perangkat lama dengan tools yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem yang ada dan spesifikasi yang masih rendah khususnya pada penyimpanan dan kecepatan datanya. Hanya bisa menggunakan sebuah aplikasi - aplikasi yang kurang menunjang untuk menghasilkan sebuah Aplikasi sebagaimana yang diharapkan dengan lebih lengkap, efektif, efesien dan terkomputerisasi semuanya dengan baik hingga akhir pada proses pencetakan.

4.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan suatu kegiatan pengembangan prosedur dan proses yang sedang berjalan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, atau memperbaharui sistem yang ada untuk meningkatkan efektifitas kerja agar dapat memenuhi hasil yang digunakan dengan tujuan memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang tersedia. Rancangan sistem yang baru akan diterapkan suatu kegiatan untuk menemukan dan mengembangkan metode, prosedur dan proses suatu data agar tujuan dari instansi dapat tercapai. Suatu perancangan aplikasi dimaksudkan untuk meminimalisasi kekurangan, kelemahan dan meningkatkan sistem yang sedang berjalan.

4.2.1. Tujuan Perancangan Sistem

Tujuan perancangan sistem adalah untuk mendesain program melalui kreatifitas dengan menggunakan bentuk operasi berupa sumber - sumber diagram alir sistem. Dari tahapan perancangan ini menghasilkan suatu sistem baru yang benar - benar dapat menjelaskan semua aktivitas dengan baik sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan keinginan pengguna dan diharapkan pula dapat meminimalisasi kekurangan, kelemahan dan meningkatkan sistem yang sedang berjalan.

4.2.2. Gambaran Umum Sistem Yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan tidak berbeda jauh seperti sistem yang sedang berjalan dan memiliki beberapa prosedur dan proses, diantaranya : Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak yang memiliki proses pemrosesan validasi SSPD, proses pembuatan Slip Setoran dan STS wajib pajak, serta proses

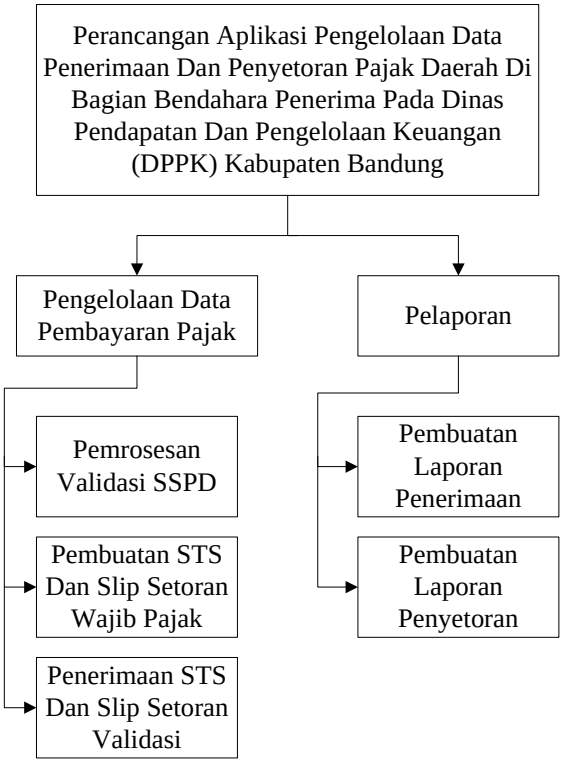
penerimaan Slip Setoran dan STS Validasi dan Prosedur Pelaporan yang memiliki proses pembuatan laporan penerimaan dan proses pembuatan laporan penyetoran, hanya saja pengoptimalisasian database untuk menunjang sistem yang sedang berjalan tersebut.

4.2.3. Perancangan Prosedur Yang Diusulkan

Prosedur untuk perancangan yang diusulkan tidak ada yang berubah masih sama seperti sistem yang sedang berjalan, yaitu : Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak yang memiliki proses pemrosesan validasi SSPD, proses pembuatan Slip Setoran dan STS wajib pajak, serta proses penerimaan Slip Setoran dan STS Validasi dan Prosedur Pelaporan yang memiliki proses pembuatan laporan penerimaan dan proses pembuatan laporan penyetoran.

4.2.3.1. Struktur Proses Yang Diusulkan

Pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini terdapat beberapa prosedur yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat melalui bagan struktur proses yang diusulkan dibawah ini :

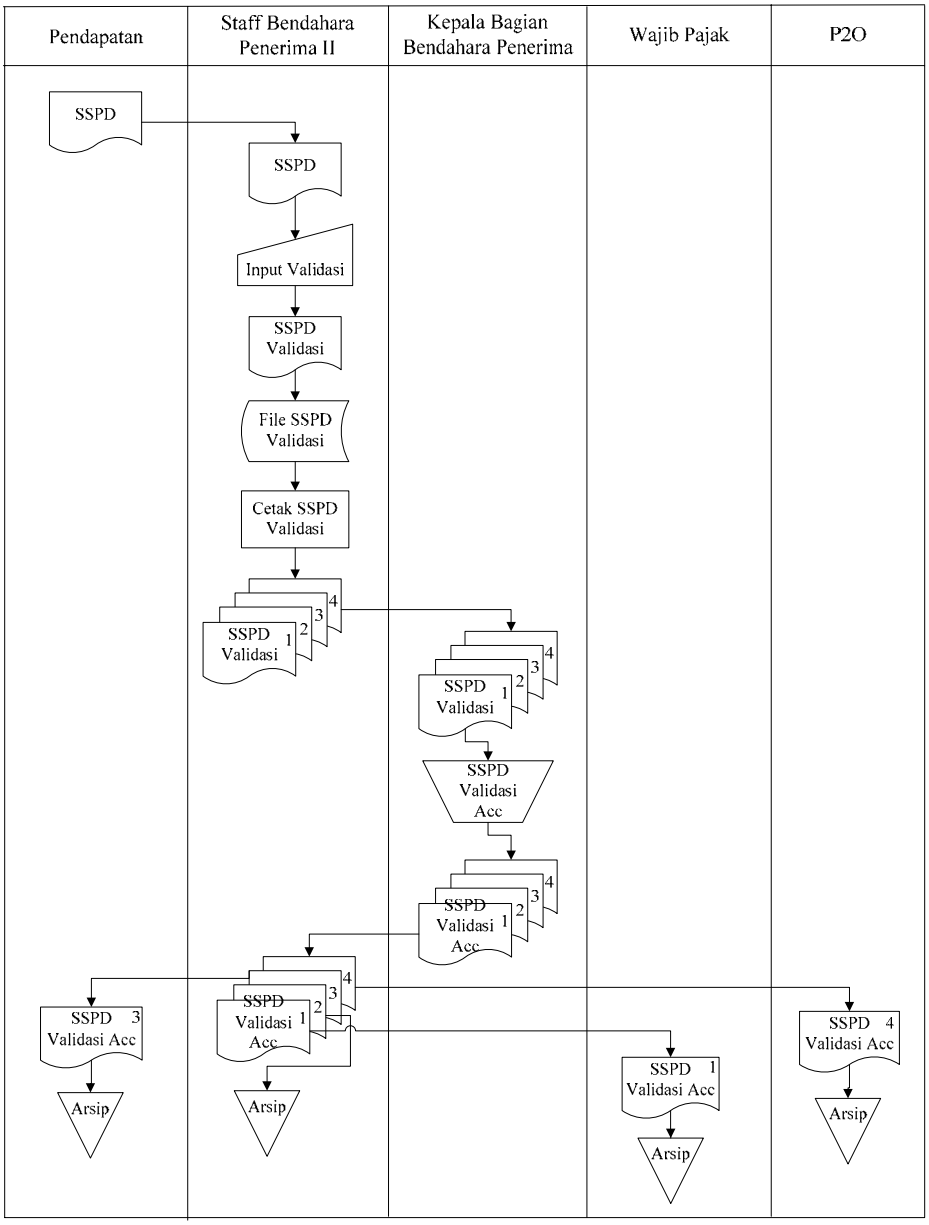


Gambar 4.10 Strukur Proses Yang Diusulkan Pada Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

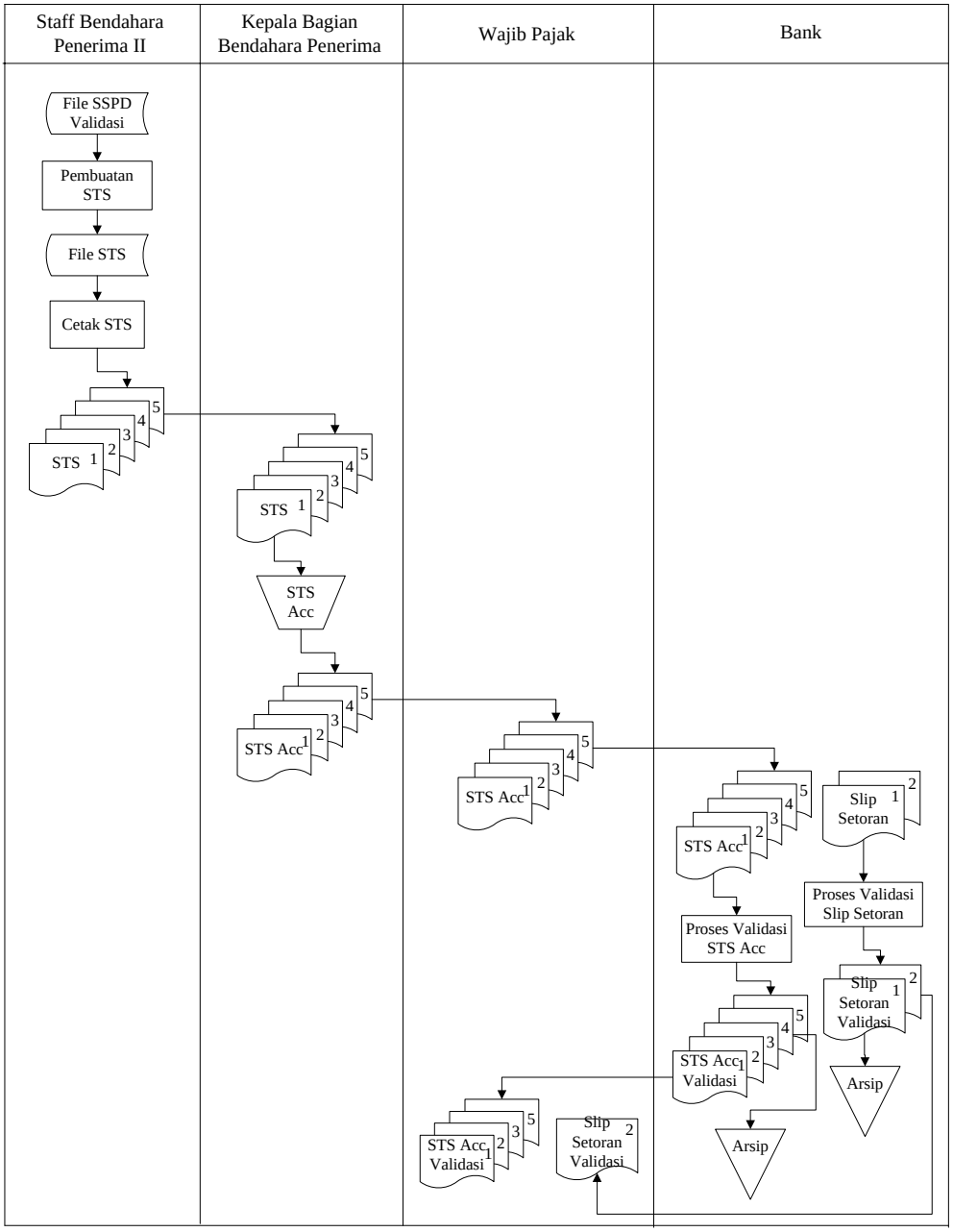
4.2.3.2. Flow Map Yang Diusulkan

Aliran dokumen yang terjadi pada Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini dapat dilihat dari gambar flowmap dibawah yang dibuat berurutan berdasarkan prosedur dan proses yang diusulkan.

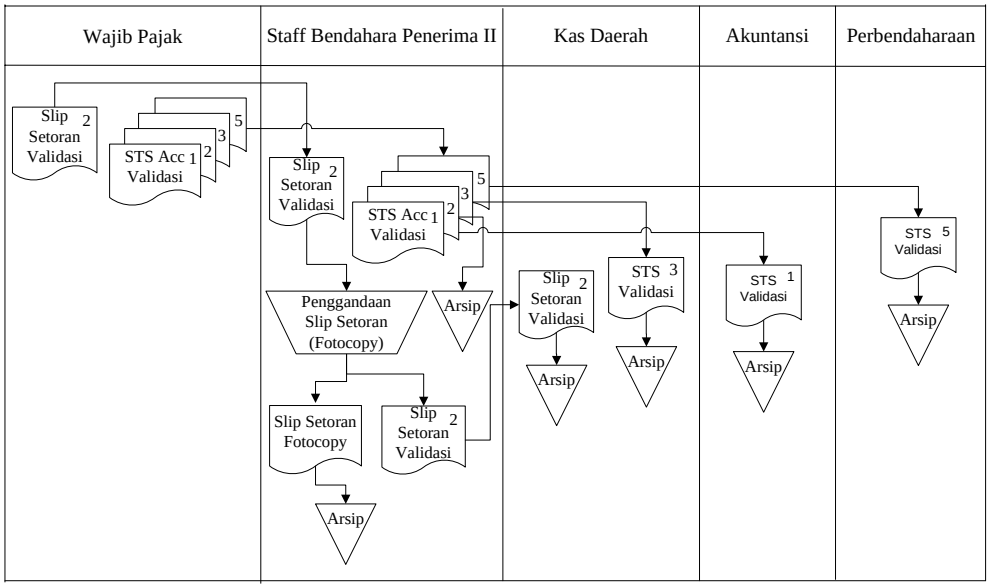
I. Prosedur Pengelolaan Data Pembayaran Pajak



Gambar 4.11 Flowmap Pemrosesan Validasi SSPD Yang Diusulkan

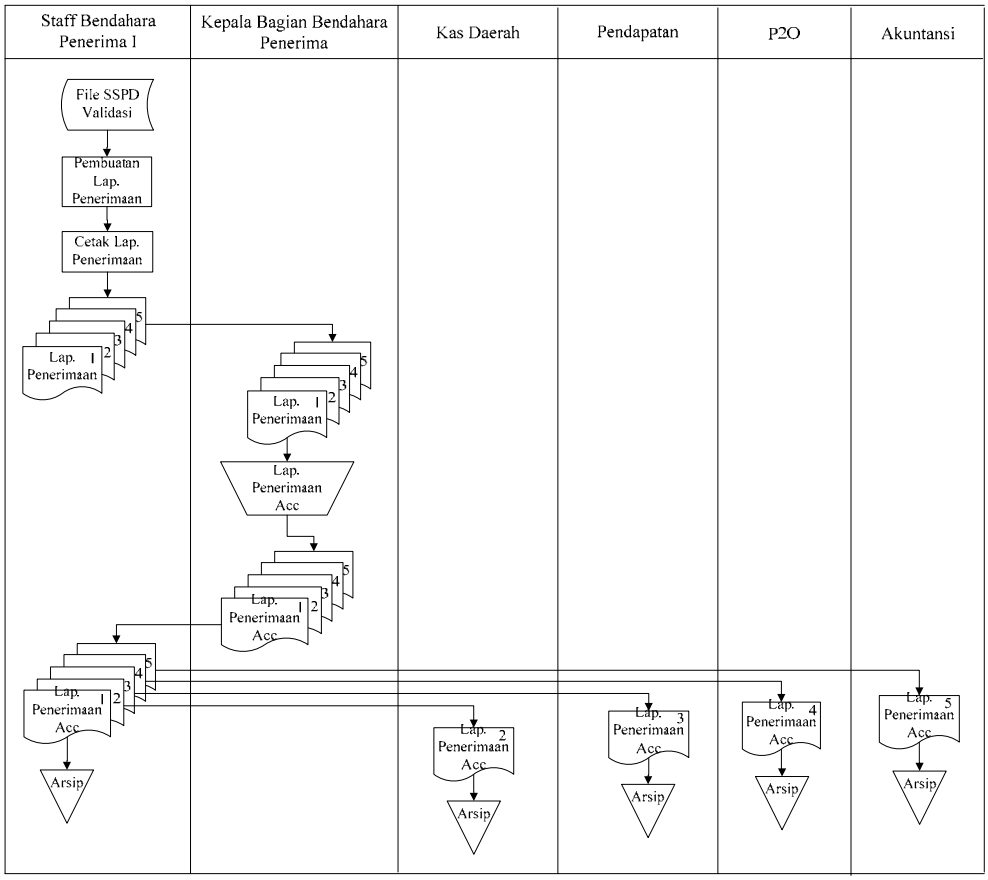


Gambar 4.12 Flowmap Pembuatan STS dan Slip Setoran Wajib Pajak Yang Diusulkan

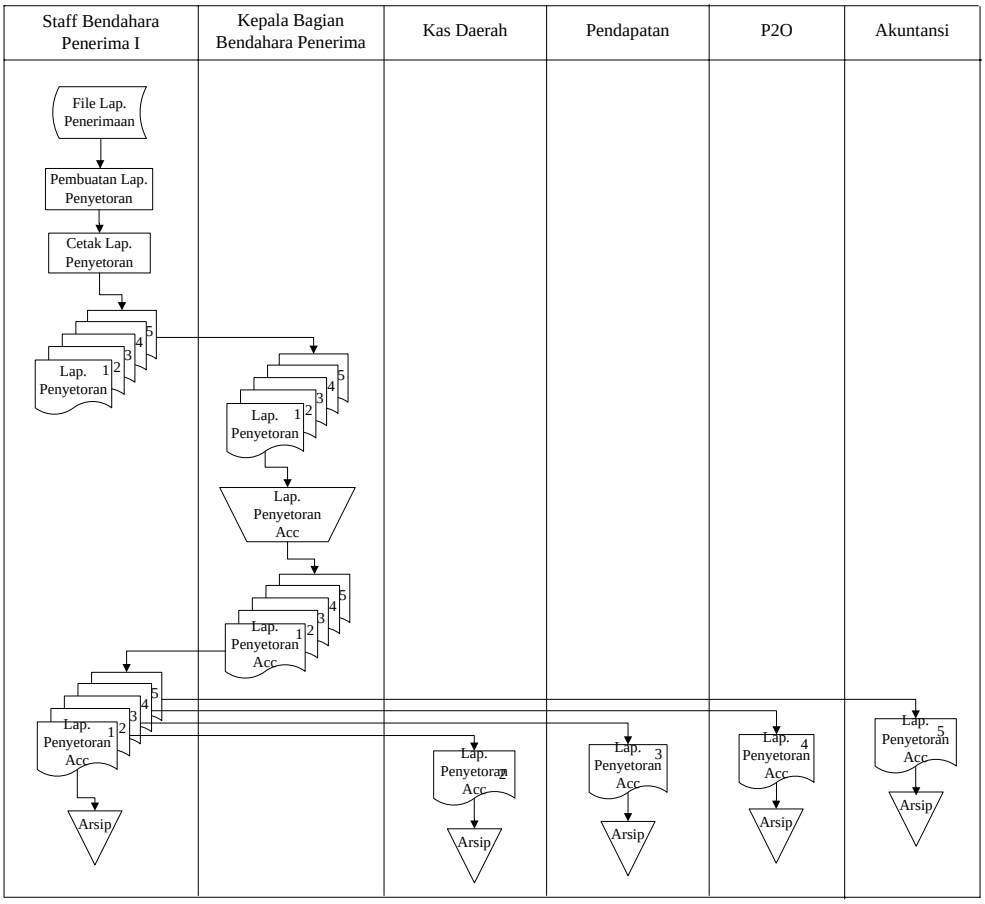


Gambar 4.13 Flowmap Penerimaan STS dan Slip Setoran Validasi Yang Diusulkan

II. Prosedur Pelaporan



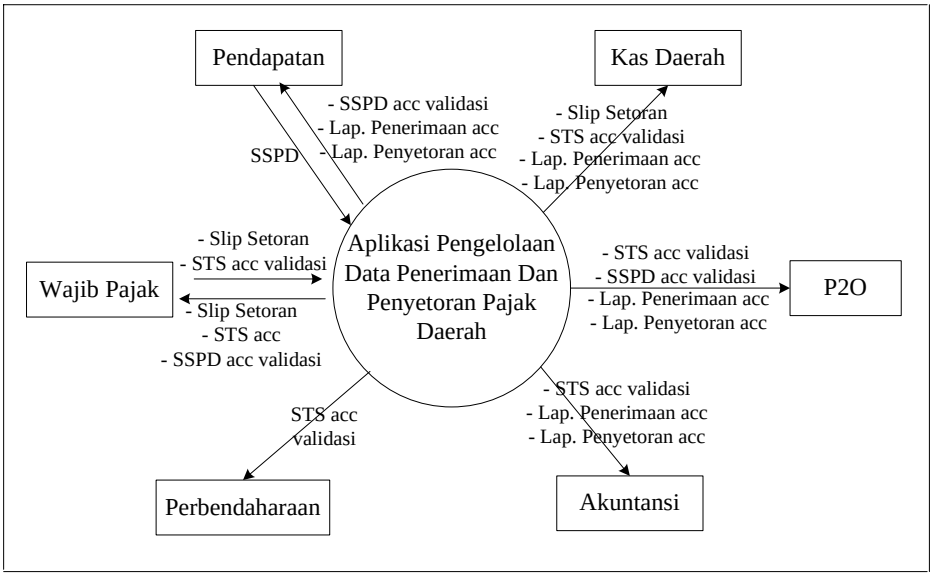
Gambar 4.14 Flowmap Pembuatan Laporan Penerimaan Yang Diusulkan



Gambar 4.15 Flowmap Pembuatan Laporan Penyetoran Yang Diusulkan

4.2.3.2. Diagram Kontek / DFD Level 0

Diagram Konteks adalah penggambaran sistem secara garis besar. Adapun diagram konteks yang di usulkan dari Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah di Bagian Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :



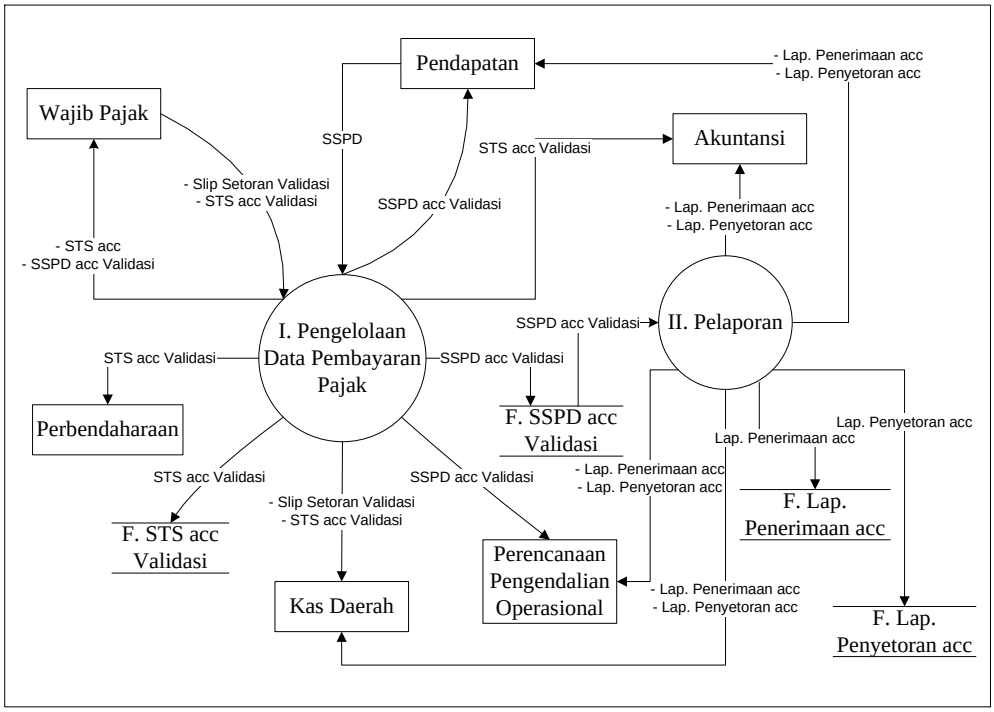
Gambar 4.16 Diagram Kontek / DFD Level 0 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Diusulkan

4.2.3.3. Data Flow Diagram

Diagram alir data (*Data Flow Diagram*) adalah teknik pemodelan secara grafis yang menggambarkan aliran data dalam sistem serta fungsi - fungsi (proses) yang terlibat dalam transformasi aliran data tersebut.

a. DFD Level 1 Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

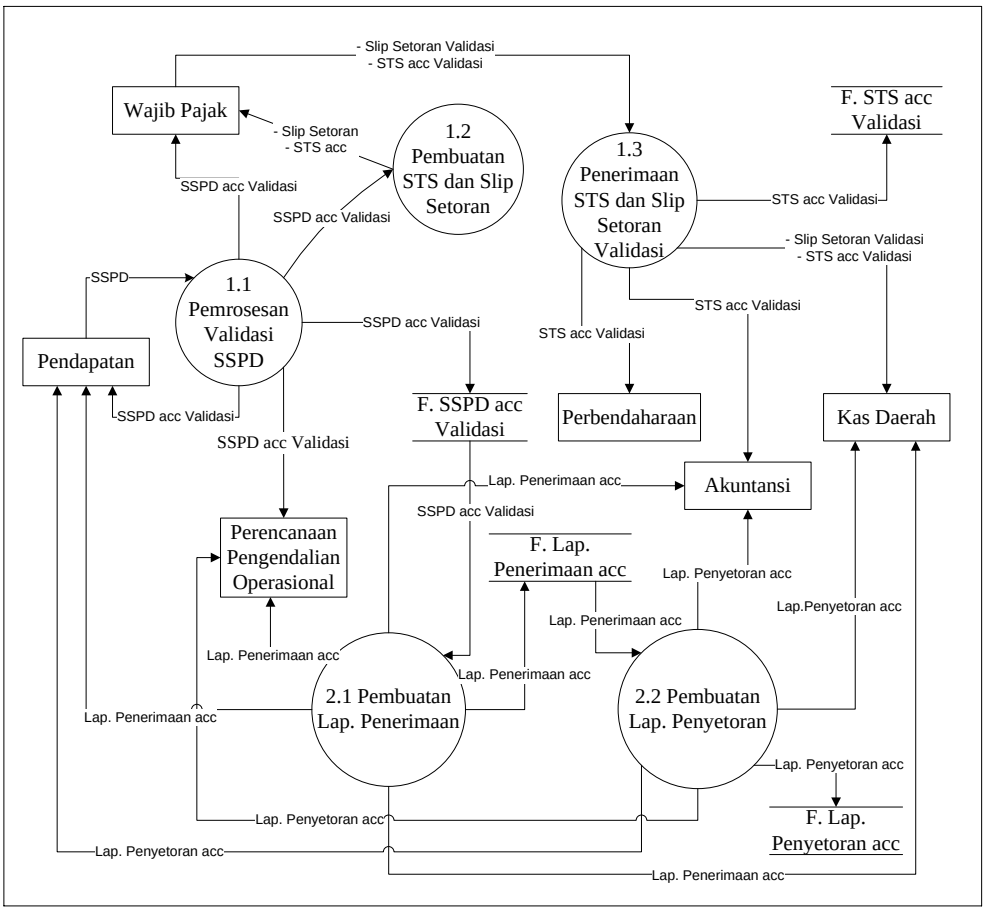
Data Flow Diagram yang di usulkan untuk Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.17 DFD Level 1 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Diusulkan

b. DFD Level 2 Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah

DFD ini merupakan hasil pecahan atau break down dari DFD level 1 Aplikasi Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah untuk memperjelas proses - proses yang ada. Berikut adalah DFD level 2 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah yang di usulkan :



Gambar 4.18 DFD Level 2 Pengelolaan Data Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Yang Diusulkan

4.2.3.4. Kamus Data

Pada Perancangan Aplikasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah ini setelah di analisis maka dapat terlihat arus data dari prosedur – prosedur yang berjalan, hal tersebut dapat dilihat pada table kamus data dibawah ini :

Tabel 4.2 Kamus Data

Nama Arus Data	Uraian
1. Data SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)	Alias : - Aliran : Pendapatan – Proses 1.1, Proses 1.1 – Wajib Pajak, Proses 1.1 – F. SSPD Validasi, Proses 1.1 – Pendapatan, Proses 1.1 – P2O Atribut : No_Kohir, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU, NPWPD, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, KodeRekPajak, UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, JumlahKetetapanPokokPajak, DendaPokokPajak, JumlahKetetapanPokokPajak+Denda
2. Data Slip Setoran	Alias : - Aliran : Wajib Pajak – Proses 1.3, Proses 1.3 – Kas Daerah Atribut : NoRekBank, NamaCabangBank, NoRekDinas, NamaPemegangRek, JenisPembayaranPajak, JenisSetoran, Tgl_Transaksi, Waktu_Transaksi, JumlahPembayaran, NamaPenyetor
3. Data STS (Surat Tanda Setoran)	Alias : - Aliran : Proses 1.2 – Wajib Pajak, Wajib Pajak – Proses 1.3, Proses 1.3 – Akuntansi, Proses 1.3 – F. STS Validasi, Proses 1.3 – Kas Daerah, Proses 1.3 - Perbendaharaan

	Atribut : No_STS, NamaReferensiBank, NoRekBank, KodeRekPajak, UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, TotalJumlahPembayaranPajak, Tgl_Transaksi, NoRekDinas, JenisPembayaran, NamaDinas, Waktu_Transaksi
4. Lap. Penerimaan	Alias : - Aliran : F. SSPD Validasi – Proses 2.1, Proses 2.1 – F. Lap. Harian, Proses 2.1 – Kas Daerah, Proses 2.1 - Pendapatan, Proses 2.1 - P2O, Proses 2.1 - Akuntansi Atribut : Periode, BulanPenerimaan, Tgl_Penerimaan, NoBuktiPenerimaan., KodeRekPajak, JenisPajak, UraianPenerimaanPajak, JumlahPenerimaan
5. Lap. Penyetoran	Alias : - Aliran : F. Lap. Harian - Proses 2.2, Proses 2.2 – F. Lap. Harian, Proses 2.2 – Kas Daerah, Proses 2.2 - Pendapatan, Proses 2.2 - P2O, Proses 2.2 - Akuntansi Atribut : Periode, BulanPenyetoran, Tgl_Penyetoran, NoBuktiPenyetoran., KodeRekPajak, JenisPajak, CaraPembayaran, UraianPenyetoranPajak, JumlahPenyetoran

4.2.4. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan berdasarkan hasil dari tahap analisis. Dalam menyusun basis data pertama kita harus melakukan proses normalisasi yaitu, proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit.

4.2.4.1. Normalisasi

a. Unnormal

No_Kohir, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU, NPWPD, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, KodeRekPajak, UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, JumlahKetetapanPokokPajak, DendaPokokPajak, JumlahKetetapanPokokPajak+Denda, NoRekBank, NamaCabangBank, NoRekDinas, NamaPemegangRek, JenisPembayaran, JenisSetoran, Tgl_Transaksi, Waktu_Transaksi, JumlahPembayaranPajak, No_STS, NamaReferensiBank, NoRekBank, KodeRekPajak, UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, TotalJumlahPembayaranPajak, Tgl_Transaksi, NoRekDinas, JenisPembayaran, NamaDinas, Waktu_Transaksi, Periode, BulanPenerimaan, Tgl_Penerimaan, NoBuktiPenerimaan., KodeRekPajak, JenisPajak, UraianPenerimaanPajak, JumlahPenerimaan, Periode, BulanPenyetoran, Tgl_Penyetoran, NoBuktiPenyetoran., KodeRekPajak, JenisPajak, CaraPembayaran, UraianPenyetoranPajak, JumlahPenyetoran

b. Normal 1

No_Kohir, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU, NPWPD, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, KodeRekPajak, UraianPajakDaerah, JumlahPembayaranPajak, JumlahKetetapanPokokPajak, DendaPokokPajak, JumlahKetetapanPokokPajak+Denda, NoRekBank, NamaCabangBank, NoRekDinas, NamaPemegangRek, JenisPembayaran, JenisPajak, Tgl_Transaksi, Waktu_Transaksi, No_STS, NamaReferensiBank, TotalJumlahPembayaranPajak, NamaDinas, Periode, Bulan, Tgl_Penerimaan,

NoBuktiPenerimaan. UraianPenerimaanPajak, CaraPembayaran, JumlahPenerimaan, Tgl_Penyetoran, UraianPenyetoranPajak, JumlahPenyetoran

c. Normal 2

Wajib Pajak : NPWPD, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU

Pegawai : NIP, Nama_Pegawai, Jabatan, Divisi_Bagian

SSPD : No_Kohir, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, KodeRek_Pajak, UraianPajakDaerah, Jumlah_KPP, Denda_PokokPajak, Jumlah_ KPP+Denda, NPWPD

STS : No_STS, JenisSetoran, JumlahPembayaranPajak, TotalJumlahPembayaranPajak, Waktu_Transaksi, Tgl_Transaksi

Bank : NoRek_Bank, NamaReferensiBank, NamaCabangBank, JenisPembayaran

Dinas : NoRek_Dinas, NamaDinas, NamaPemegangRek, NIP

Penerimaan : No_Kohir, NoBuktiPenerimaan, Tgl_Penerimaan, Jumlah_Penerimaan, Cara_Pembayaran, Periode, Bulan

Penyetoran : Periode, Bulan, Tgl_Penyetoran, No_STS, JumlahPenyetoran

d. Normal 3

Wajib Pajak : NPWPD, Nama_WP, Alamat_WP, Nama_BU, Alamat_BU

Pegawai : NIP, Nama_Pegawai, Jabatan, Divisi_Bagian

SSPD : No_Kohir, Tgl_Validasi, Waktu_Validasi, Tgl_JatuhTempo, Jenis_Setoran, Jumlah_KPP, Denda_PokokPajak, Jumlah_ KPP+Denda, NPWPD

Bank : NoRek_Bank, NamaReferensiBank, NamaCabangBank, JenisPembayaran

Penerimaan : NoBuktiPenerimaan, Tgl_Penerimaan, Jumlah_Penerimaan, TotalJumlahPenerimaan

Penyetoran : Tgl_Penyetoran, No_STS, JumlahPenyetoran, TotalJumlahPenyetoran

STS : No_STS, JenisSetoran, TotalJumlahPembayaranPajak, NoRekBank

Objek Pajak : KodeRekPajak, UraianPajakDaerah

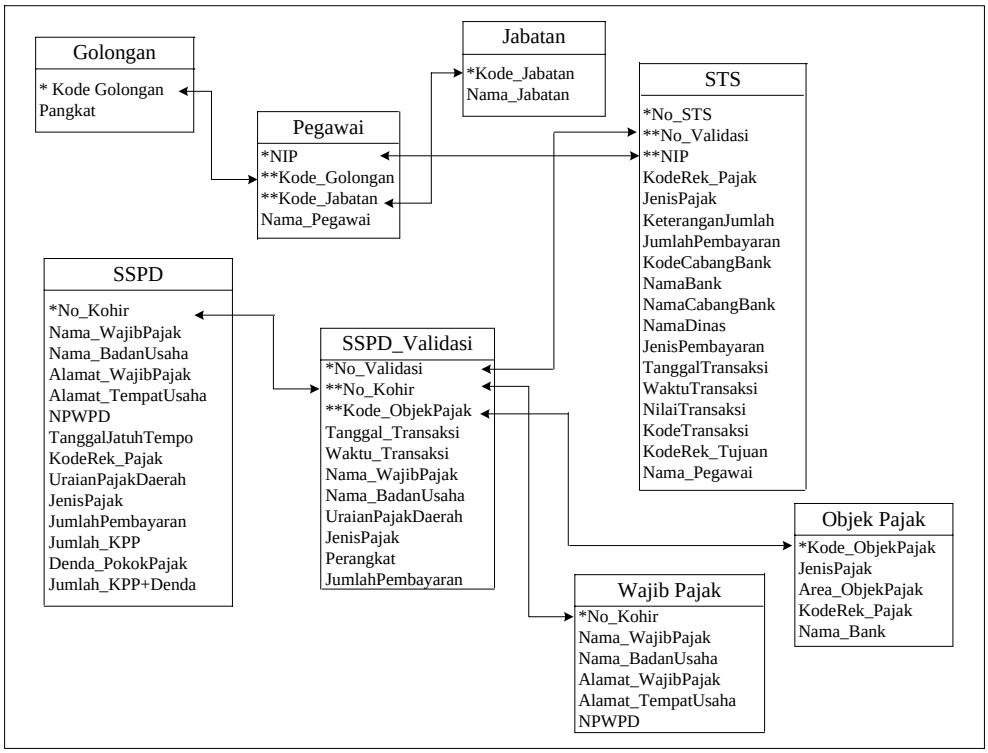
Transaksi : NoRekDinas, WaktuTransaksi, Tgl_Transaksi, Cara_Pembayaran, JumlahPembayaranPajak

SKPD : No_Kohir, JenisSetoran, JumlahPembayaranPajak

Target Pendapatan : KodeRek_Pajak, Periode, Bulan, Target, NilaiTarget, TotalTarget

4.2.4.2. Relasi Tabel

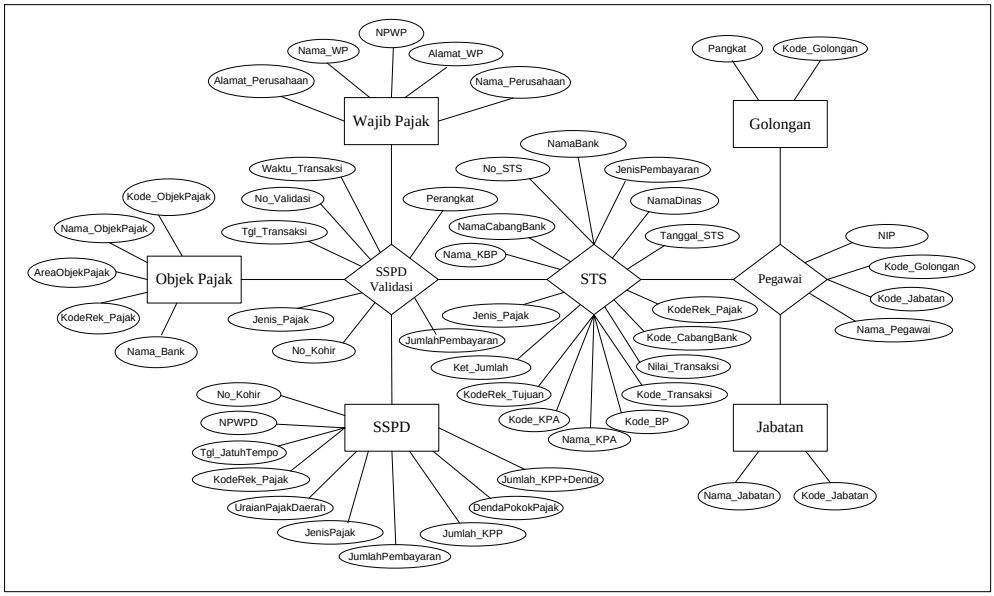
Dari normalisasi yang dilakukan maka akan terbentuk sebuah relasi tabel seperti berikut ini :



Gambar 4.19 Relasi Tabel

4.2.4.3. Entity Relationship Diagram

Dari tabel relasi di atas dapat dibuat ERD sebagai berikut ini :



Gambar 4.20 Entity Relationship Diagram

4.2.4.4. Struktur File

Struktur file yang akan digunakan didalam perancangan aplikasi ini akan menentukan struktur fisik database yang menunjukan struktur dari elemen – elemen yang menyatakan panjang data dan file datanya. Pengembangan strukur file yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Struktur File SSPD

   Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data pembayaran pajak dari Wajib Pajak, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut :

   Nama File : SSPD

   Primary key : No. Kohir

   Foreign Key : NPWPD, No. Rek Pajak

Field :

- Nama_WP
- Nama_BadanUsaha
- Alamat_WP
- Alamat_BadanUsaha
- Tanggal_JatuhTempo
- UraianPajakDaerah
- JumlahPembayaran
- Jumlah_KPP
- DendaPokokPajak
- Jumlah_KPP+Denda

2. Struktur File SSPD Validasi

Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerima yang nantinya akan diserahkan kepada Wajib Pajak, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut :

Nama File : SSPD Validasi

Primary key : No. Validasi

Foreign Key : No. Kohir

Field :

- Tanggal_Transaksi
- Waktu_Transaksi
- Nama_WP
- Nama_BadanUsaha

- UraianPajakDaerah
- JumlahPembayaran

3. Data STS

Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data penyetoran pajak dari Bag. Bendahara Penerima untuk diserahkan kepada Bag. Akuntansi, Bag. Bendahara Penerima, Kas Daerah, Bank dan Bag. Perbendaharaan, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut :

Nama File : Surat Tanda Setoran (STS)

Primary key : No. STS

Foreign Key : Kode Rek. Pajak, No. Rek Bank, No. Rek Dinas

Field :

- UraianRincianObjek
- JumlahPembayaran
- NamaCabang Bank
- NamaDinas
- JenisSetoran
- JenisPembayaran
- Tgl_Transaksi
- Waktu_Transaksi

4. Data Objek Pajak

Pada file ini menerangkan tentang field mengenai data jenis – jenis pajak yang ada di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, dengan spesifikasi fieldnya adalah sebagai berikut :

Nama File : Objek Pajak

Primary key : Kode Objek Pajak

Foreign Key : Kode Rek. Pajak

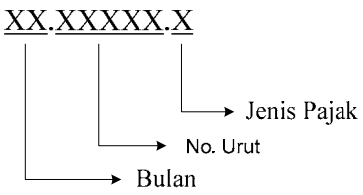
Field :

- UraianRincianObjek
- NamaObjekPajak

4.2.4.5. Kodifikasi

Kodifikasi yang ada pada dokumen – dokumen yang dikelola oleh Bagian Bendahara Penerima yaitu dokumen SSPD, dokumen SSPD yang telah di validasi, dokumen Nota Hitung, dokumen STS dan dokumen Objek Pajak. Pengkodean yang digunakan pada dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

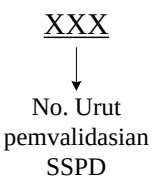
1. Kodifikasi No. Kohir yang ada pada dokumen SSPD :



Contoh : 04.00031.4

1 digit terakhir menunjukkan jenis pajak yang dibayarkan, 5 digit ditengah menunjukkan no urut pembayaran pajak dan 2 digit paling depan menunjukkan bulan pembayaran pajak.

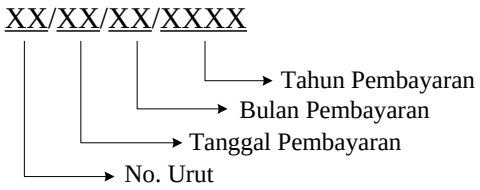
2. Kodifikasi No. Validasi yang ada pada dokumen SSPD Validasi :



Contoh : 001

Menunjukkan no. urut pemvalidasian SSPD bahwa wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan yang sudah ditentukan.

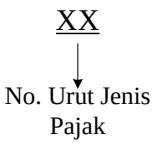
3. Kodifikasi No. STS yang ada pada dokumen STS :



Contoh : 03/05/05/2010

4 digit terakhir menunjukkan tahun pembayaran pajak, 2 digit ditengah menunjukkan bulan pembayaran pajak, 2 digit dtengah juga menunjukkan tanggal pembayaran pajak dan 2 digit paling depan menunjukkan no. urut pembuatan STS.

4. Kodifikasi No. Objek Pajak yang ada pada dokumen Objek Pajak :



Contoh : 01

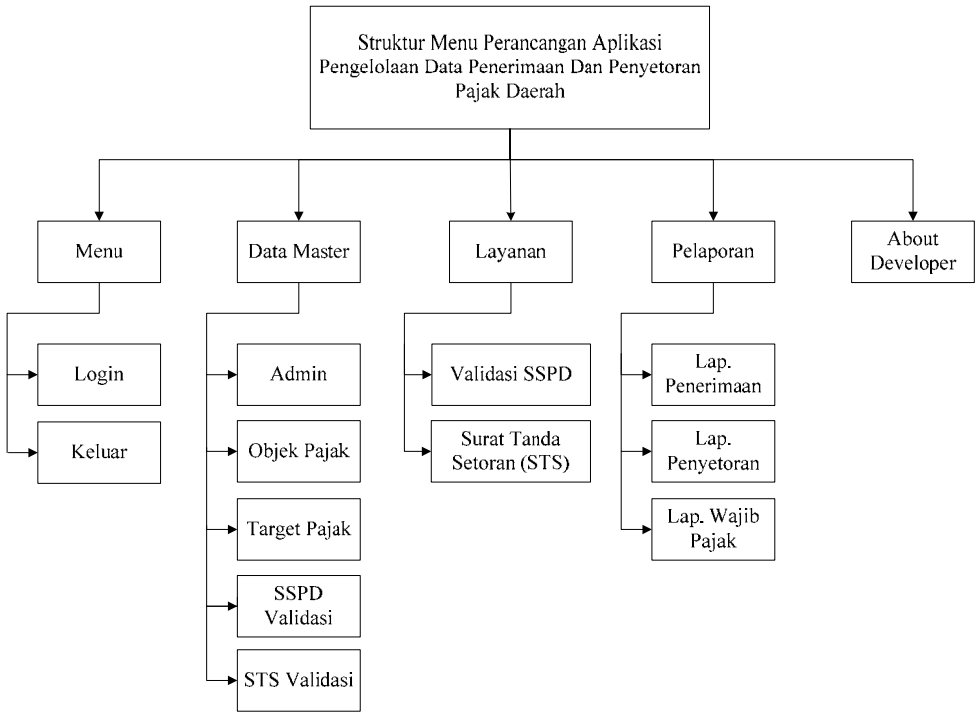
Menunjukkan no. urut jenis pajak daerah.

4.2.5. Perancangan Antar Muka

Rancangan tampilan untuk antarmuka perangkat lunak terdiri dari Struktur Menu, Perancangan Input dan Perancangan Output.

4.2.5.1. Struktur Menu

Struktur menu ini menggambarkan interface dari aplikasi yang dibuat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.21 Struktur Menu

Gambar diatas merupakan menu utama dari aplikasi pengelolaan data penerimaan dan penyetoran pajak daerah yang memiliki beberapa sub menu diantaranya :

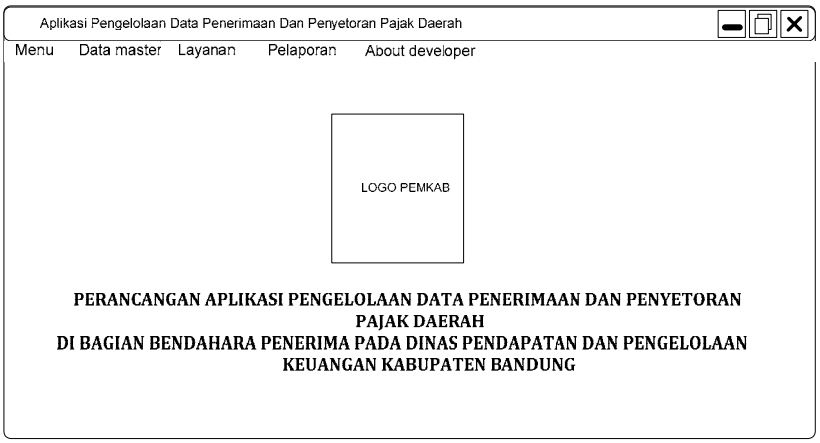
a. Login, untuk membuka suatu aplikasi
b. Keluar, untuk menutup suatu aplikasi
c. Admin, database dari aplikasi yang dibuat

d. Objek Pajak, Pajak yang harus dibebankan oleh wajib pajak
e. Target Pajak, menghitung jumlah target pajak yang akan dicapai untuk bulan – bulan selanjutnya
f. SSPD Validasi, untuk mengedit SSPD apabila ada kesalahan dalam penginputan data
g. STS Validasi, untuk mengedit STS apabila ada kesalahan dalam penginputan data
h. Validasi SSPD, pemvalidasian dokumen SSPD sebagai tanda bukti untuk wajib pajak bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajak yang telah ditentukan
i. Surat Tanda Setoran (STS), sebagai tanda bukti bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajak yang telah ditentukan
j. Laporan Penerimaan, Perincian nama – nama wajib pajak yang sudah membayarkan pajak dan jumlah pembayaran sesuai dengan ketentuan
k. Laporan Penyetoran, Perincian total jumlah pembayaran pajak dilihat dari laporan penerimaan
l. Laporan Wajib Pajak, Perincian data wajib pajak yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar pajak
m. About Developer, Biodata tentang pembuat aplikasi

4.2.5.2. Perancangan Input

Perancangan input dalam perangkat lunak yang akan dibuat terdiri dari tujuh perancangan input, yaitu Tampilan Menu utama, Login, Account Baru, Data Master Jenis Pajak, Target Pajak Daerah, Layanan Validasi SSPD dan Layanan Surat Tanda Setoran. Berikut rancangan tampilan – tampilannya :

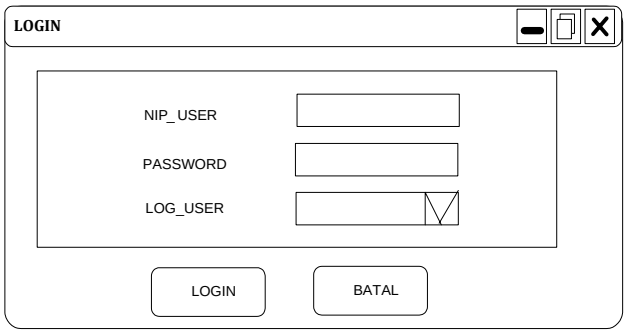
1. Perancangan Input Menu Utama



Gambar 4.22 Perancangan Input Menu Utama

Perancangan input menu utama adalah tampilan utama aplikasi pengelolaan data penerimaan dan penyetoran pajak daerah. Dalam aplikasi ini ada beberapa menu utama yaitu menu, data master, layanan, pelaporan dan about developer.

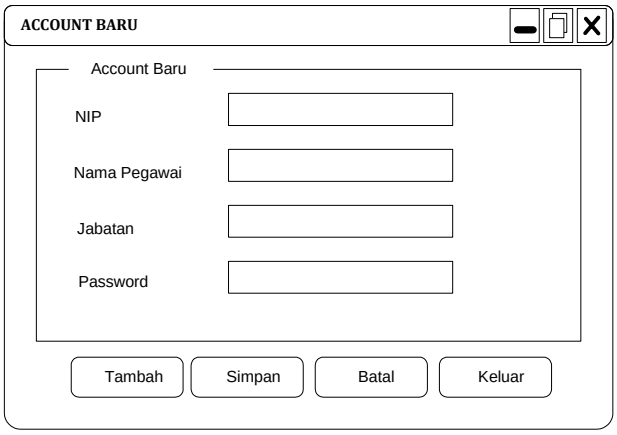
2. Perancangan Input Login



Gambar 4.23 Perancangan Input Login

Perancangan input login berfungsi sebagai pembatas hak akses pada aplikasi pengelolaan data penerimaan dan penyetoran pajak daerah ini. Terdapat beberapa field dalam login ini yaitu field NIP_User, Password dan Log_User

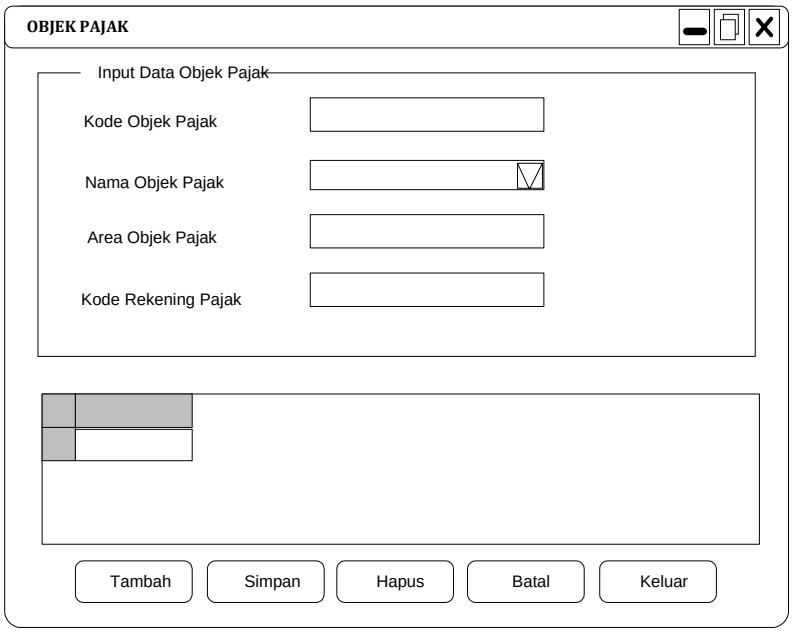
3. Perancangan Input Account Baru



Gambar 4.24 Perancangan Input Account Baru / Admin

Perancangan input Account baru / Admin sebagai hak akses apabila ada pegawai baru yang akan menggunakan aplikasi ini. Terdapat beberapa field dalam Admin ini yaitu field NIP, Nama Pegawai, Jabatan dan Password.

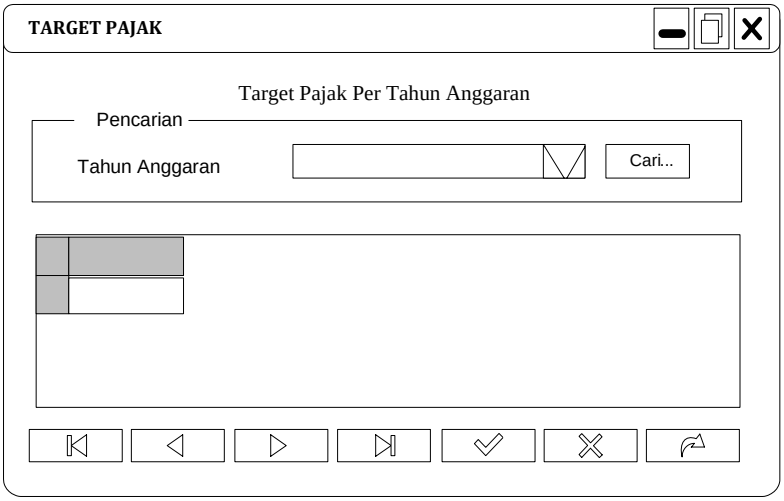
4. Perancangan Input Data Master Objek Pajak



Gambar 4.25 Perancangan Input Data Master Objek Pajak

Perancangan input data master objek pajak untuk mengisi data objek pajak. Terdapat beberapa field dalam objek pajak ini yaitu Kode objek pajak, nama objek pajak, area objek pajak dan kode rekening pajak. Dari semua inputan yang ada di objek pajak ini akan disimpan kedalam database.

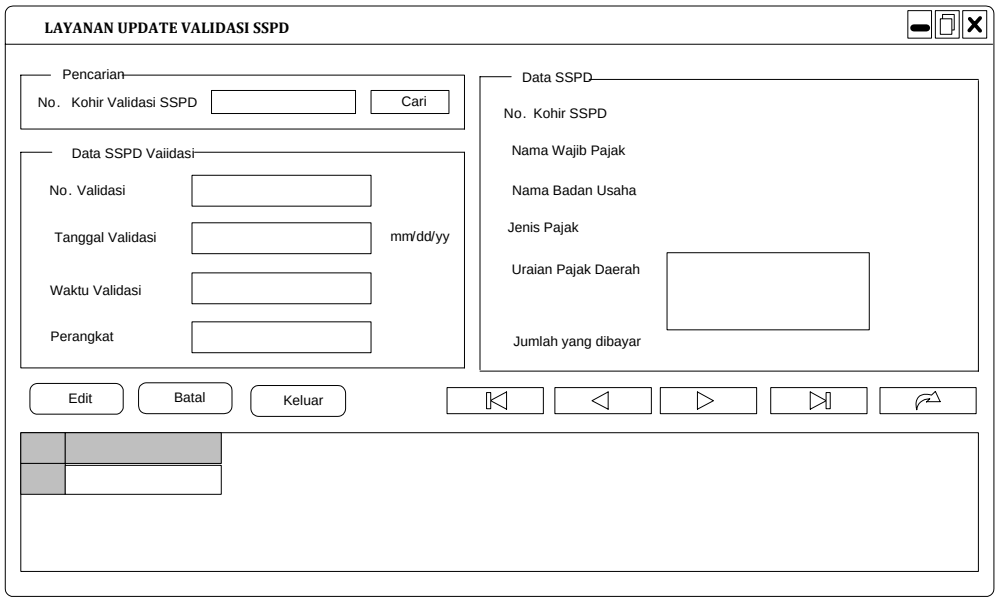
5. Perancangan Input Target Pajak Daerah



Gambar 4.26 Perancangan Input Target Pajak Daerah

Perancangan input target pajak daerah yaitu untuk pencarian target pajak per tahun anggaran yang sudah ditentukan oleh dinas propinsi. Jadi di bagian bendahara penerima ini hanya mengambil datanya saja untuk mengetahui berapa besar target tahun ini.

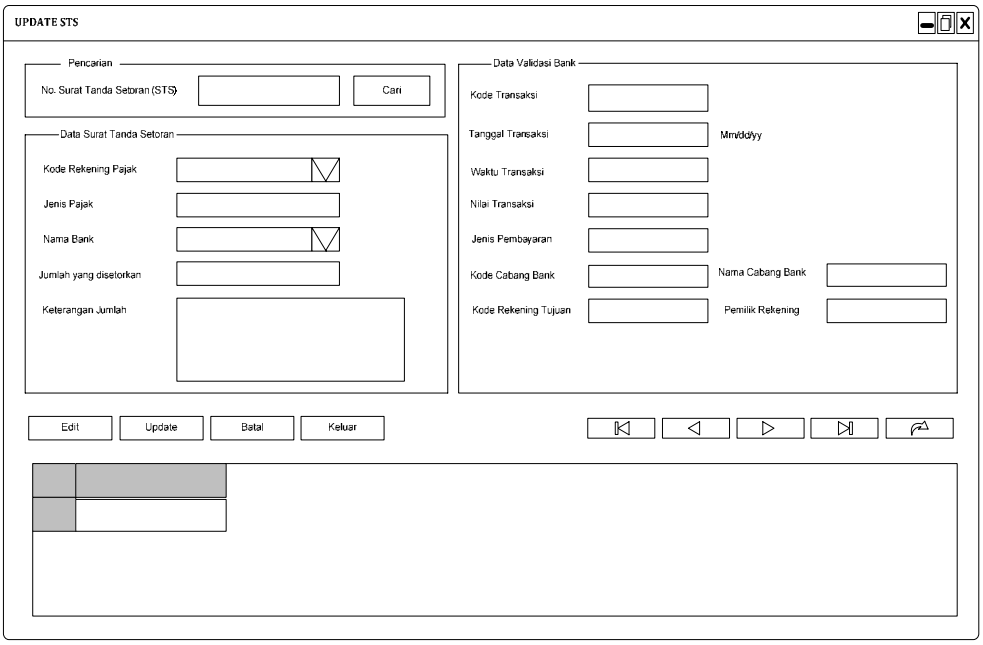
6. Perancangan Input Update Validasi SSPD



Gambar 4.27 Perancangan Input Update Validasi SSPD

Perancangan input update validasi SSPD ini sebagai fasilitas untuk mengedit validasi SSPD yang sudah diinputkan, jika sewaktu-waktu pemvalidasian tersebut ada yang salah maka dari update validasi SSPD ini data yang salah diinputkan tadi dapat diperbaharui sesuai dengan data yang sebenarnya.

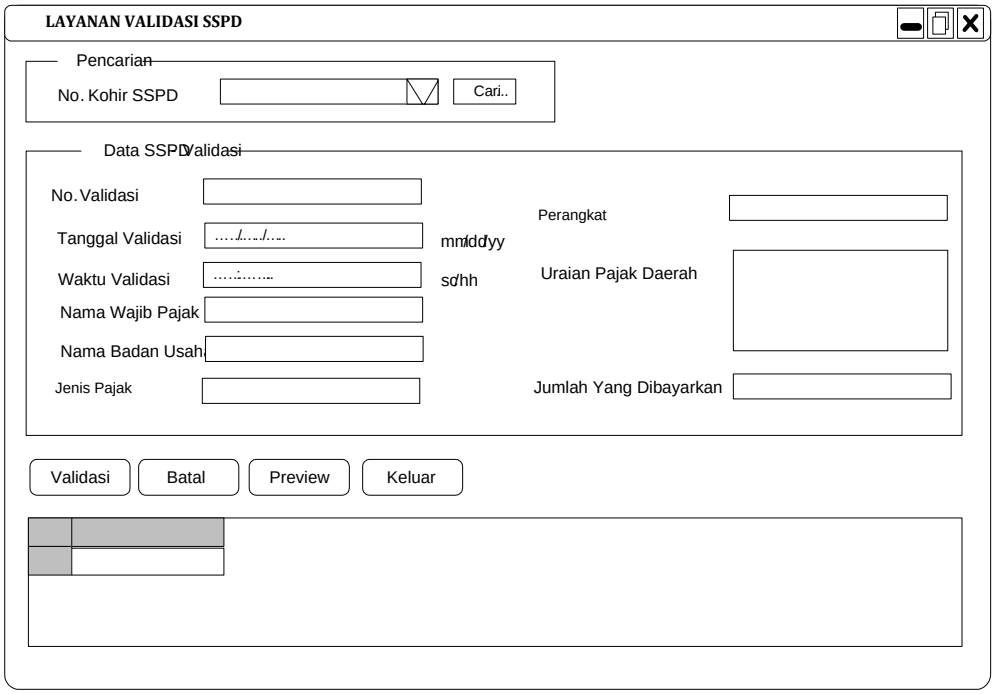
7. Perancangan Input Update STS



Gambar 4.28 Perancangan Input Update STS

Perancangan input update STS ini sebagai fasilitas untuk mengedit STS yang sudah diinputkan, jika sewaktu-waktu pemvalidasian tersebut ada yang salah maka dari update STS ini data yang salah diinputkan tadi dapat diperbaharui sesuai dengan data yang sebenarnya.

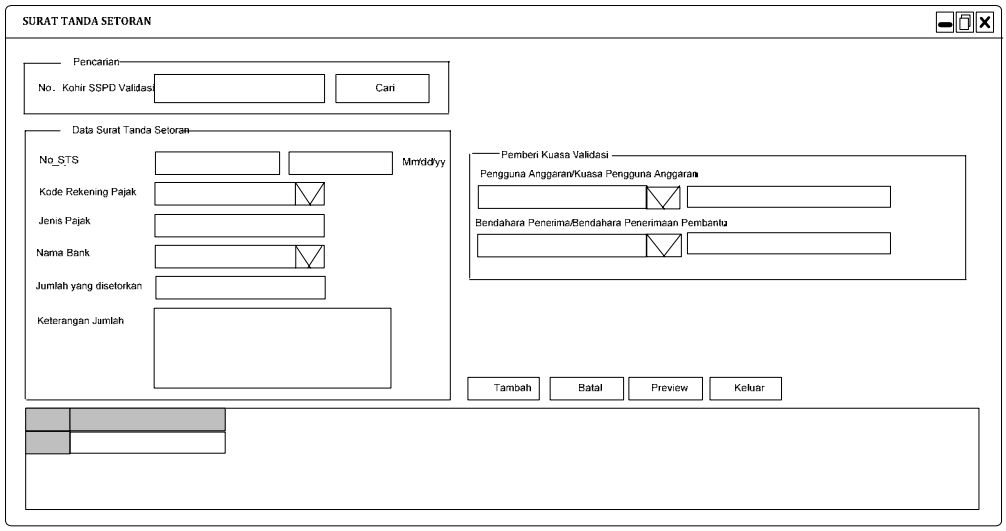
8. Perancangan Input Layanan Validasi SSPD



Gambar 4.29 Perancangan Input Layanan SSPD Validasi

Perancangan input layanan SSPD Validasi yaitu untuk menginput data SSPD yang nantinya akan di validasi dan di cetak sebagai tanda bukti pembayaran wajib pajak untuk di Bagian Bendahara Penerima.

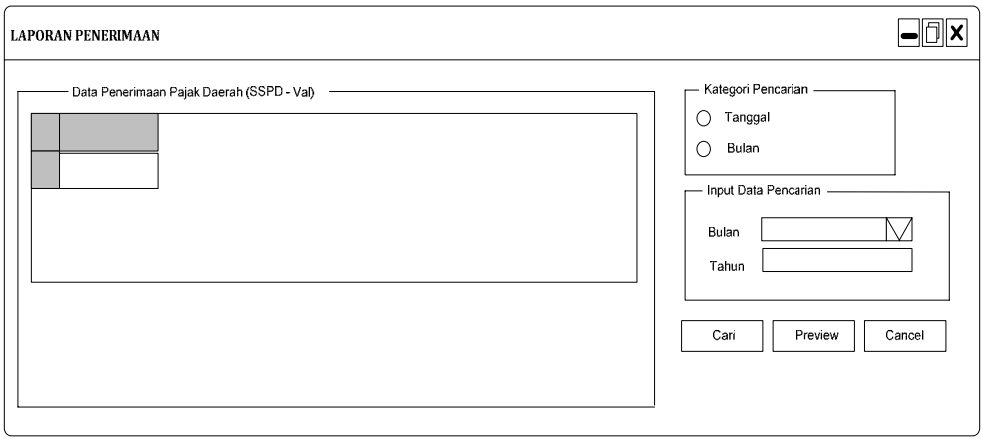
9. Perancangan Input Layanan Surat Tanda Setoran



Gambar 4.30 Perancangan Input Layanan Surat Tanda Setoran

Perancangan input layanan STS ini untuk pencarian no. kohir SSPD validasi yang nantinya akan menginputkan data STS sebagai laporan dari Bendahara Penerima ke Badan Pengawas Daerah.

10. Perancangan Input Laporan Penerimaan



Gambar 4.31 Perancangan Input Laporan Penerimaan

Perancangan input laporan penerimaan ini untuk mencetak laporan penerimaan yang diambil dari SSPD validasi. Dalam pelaporan ini dapat melakukan pencarian per tanggal, per bulan atau per tahun. Setelah pencarian selesai lalu di preview dan dicetak.

11. Perancangan input Laporan Penyetoran



Gambar 4.32 Perancangan Input Laporan Penyetoran

Perancangan input laporan penyetoran ini untuk mencetak laporan penyetoran yang diambil dari SSPD validasi. Dalam pelaporan ini dapat melakukan pencarian per tanggal, per bulan atau per tahun. Setelah pencarian selesai lalu di preview dan dicetak.

12. Perancangan Input Laporan Data Wajib Pajak



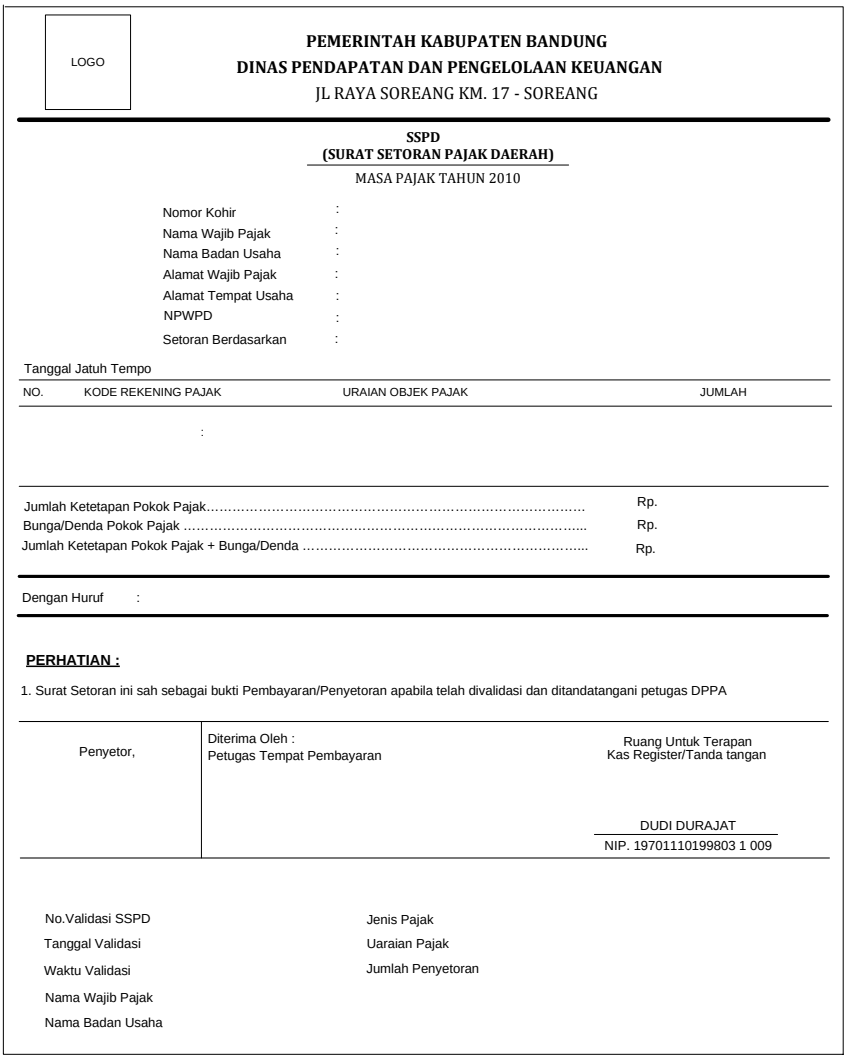
Gambar 4.33 Perancangan Input Laporan Data Wajib Pajak

Perancangan input laporam data wajib pajak ini untuk mengetahui daftar wajib pajak yang akan membayar pajak. Dari laporan inilah akan diketahui wajib pajak mana saja yang sudah membayar dan yang belum membayar pajak sesuai dengan yang ditentukan.

4.2.5.3. Perancangan Output

Perancangan Output dalam perangkat lunak yang akan dibuat terdiri dari empat tampilan, yaitu perancangan output Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Tanda Setoran (STS), Laporan Harian Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang Pajak Asli Daerah. Berikut rancangan tampilan - tampilannya :

1. Perancangan Output Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


LOGO

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JL RAYA SOREANG KM. 17 - SOREANG

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
MASA PAJAK TAHUN 2010

Nomor Kohir :
Nama Wajib Pajak :
Nama Badan Usaha :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Tempat Usaha :
NPWPD :
Setoran Berdasarkan :

Tanggal Jatuh Tempo

NO.	KODE REKENING PAJAK	URAIAN OBJEK PAJAK	JUMLAH
	:		

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak…… Rp.
Bunga/Denda Pokok Pajak …….. Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Bunga/Denda …….. Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Surat Setoran ini sah sebagai bukti Pembayaran/Penyetoran apabila telah divalidasi dan ditandatangani petugas DPPA

Penyetor,	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran	Ruang Untuk Terapan Kas Register/Tanda tangan
		DUDI DURAJAT NIP. 19701110199803 1 009

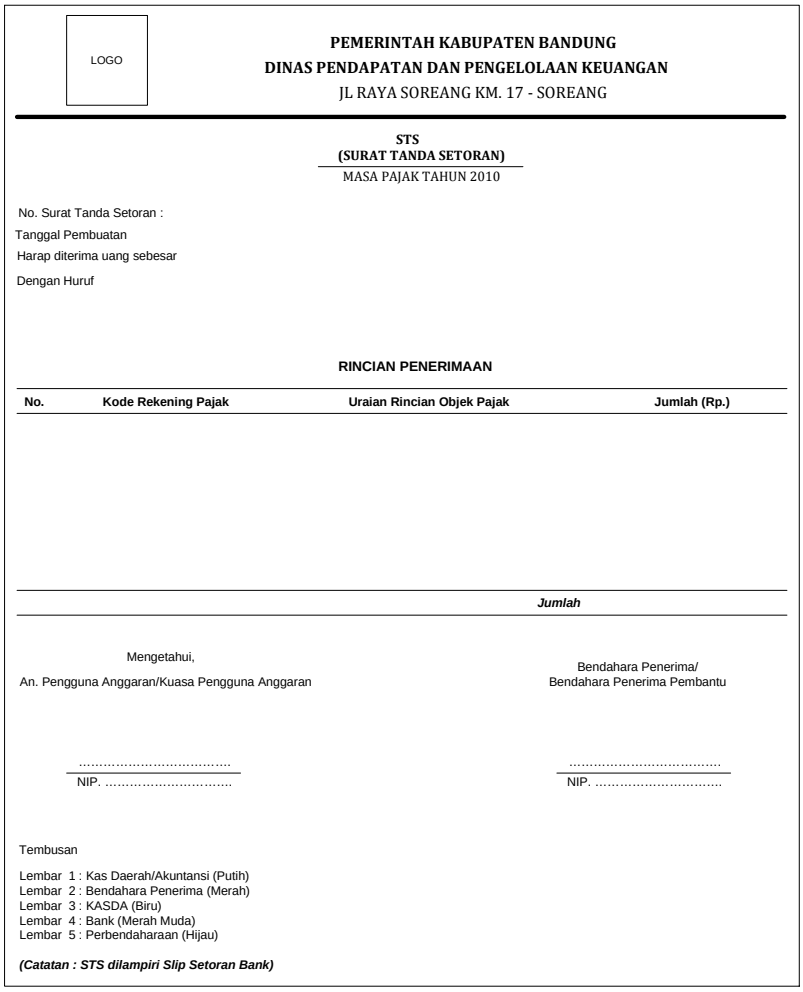
No.Validasi SSPD
Tanggal Validasi
Waktu Validasi
Nama Wajib Pajak
Nama Badan Usaha

Jenis Pajak
Uaraian Pajak
Jumlah Penyetoran

Gambar 4.34 Perancangan Output Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Perancangan output SSPD ini didapat dari inputan data SSPD validasi. Output SSPD validasi ini sebagai tanda bukti pembayaran bagi wajib pajak.

2. Perancangan Output Surat Tanda Setoran (STS)



LOGO

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JL RAYA SOREANG KM. 17 - SOREANG

STS
(SURAT TANDA SETORAN)
MASA PAJAK TAHUN 2010

No. Surat Tanda Setoran :
Tanggal Pembuatan
Harap diterima uang sebesar
Dengan Huruf

RINCIAN PENERIMAAN

No.	Kode Rekening Pajak	Uraian Rincian Objek Pajak	Jumlah (Rp.)
		Jumlah	

Mengetahui,
An. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

……
NIP. ……

Bendahara Penerima/
Bendahara Penerima Pembantu

……
NIP. ……

Tembusan

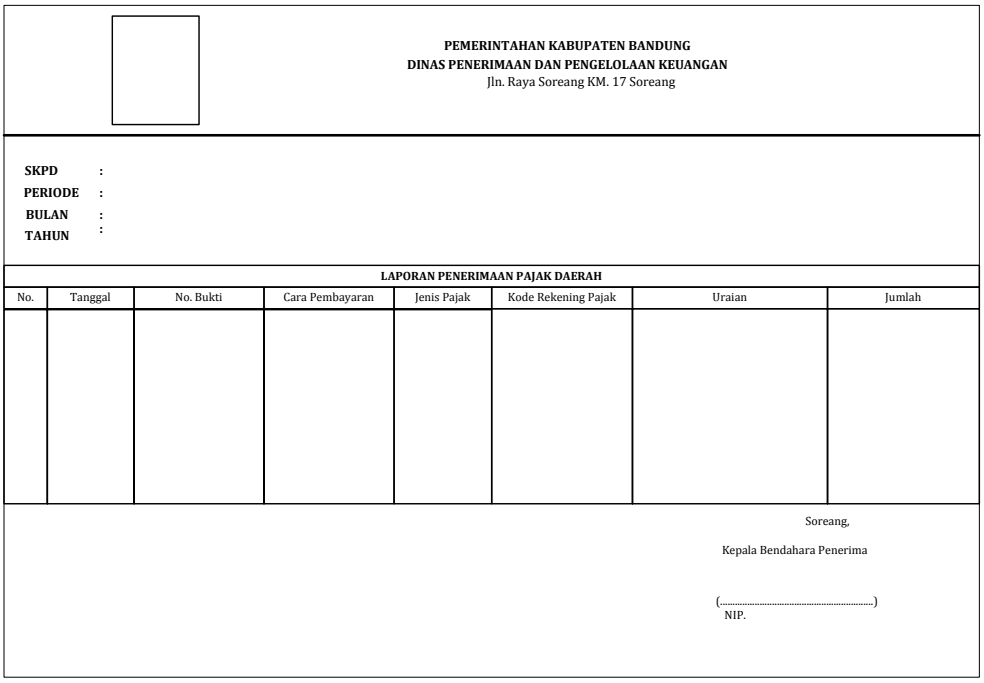
Lembar 1 : Kas Daerah/Akuntansi (Putih)
Lembar 2 : Bendahara Penerima (Merah)
Lembar 3 : KASDA (Biru)
Lembar 4 : Bank (Merah Muda)
Lembar 5 : Perbendaharaan (Hijau)

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Gambar 4.35 Perancangan Output Surat Tanda Setoran (STS)

Perancangan output STS ini didapat dari inputan data STS. Output STS ini sebagai bukti setoran dari wajib pajak ke Dinas. STS ini dibuat oleh Bagian Bendahara Penerima lalu diberikan ke wajib pajak untuk diserahkan ke Bank dan divalidasi oleh Bank, setelah proses pemvalidasian selesai STS ini diserahkan kembali ke wajib pajak untuk diberikan ke Bagian Bendahara Penerima.

3. Perancangan Output Laporan Penerimaan



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang

SKPD :
PERIODE :
BULAN :
TAHUN :

LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

No.	Tanggal	No. Bukti	Cara Pembayaran	Jenis Pajak	Kode Rekening Pajak	Uraian	Jumlah

Soreang,

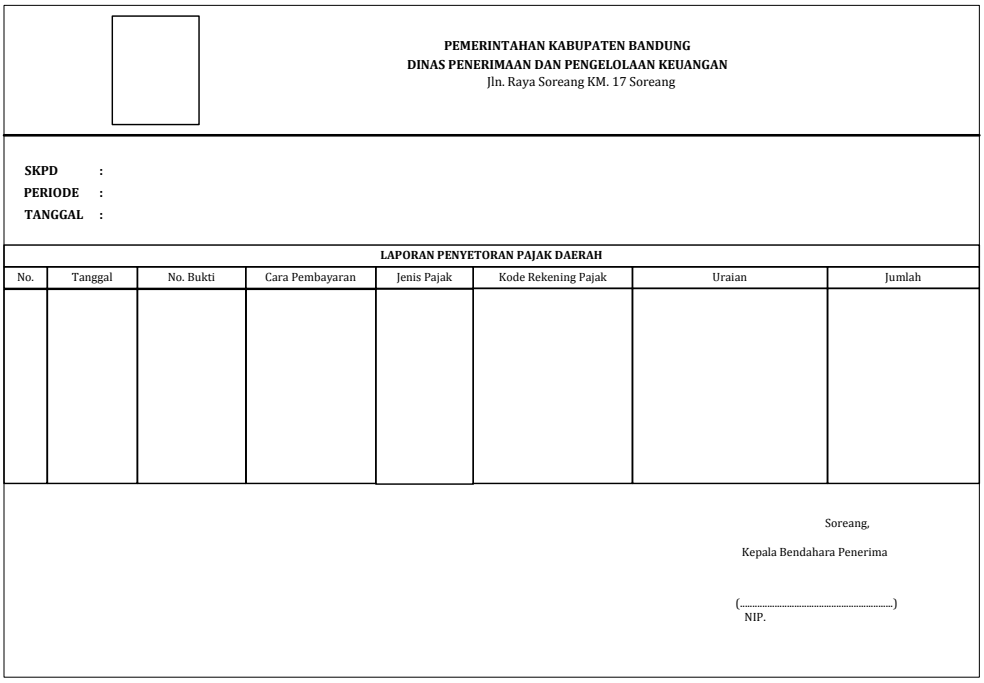
Kepala Bendahara Penerima

(.....)
NIP.

Gambar 4.36 Perancangan Output Laporan Penerimaan

Perancangan output laporan penerimaan ini didapat dari input data laporan penerimaan, yang akan diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima dan oleh beberapa bagian lainnya.

4. Perancangan Output Laporan Penyetoran



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang

SKPD :
PERIODE :
TANGGAL :

LAPORAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

No.	Tanggal	No. Bukti	Cara Pembayaran	Jenis Pajak	Kode Rekening Pajak	Uraian	Jumlah

Soreang,

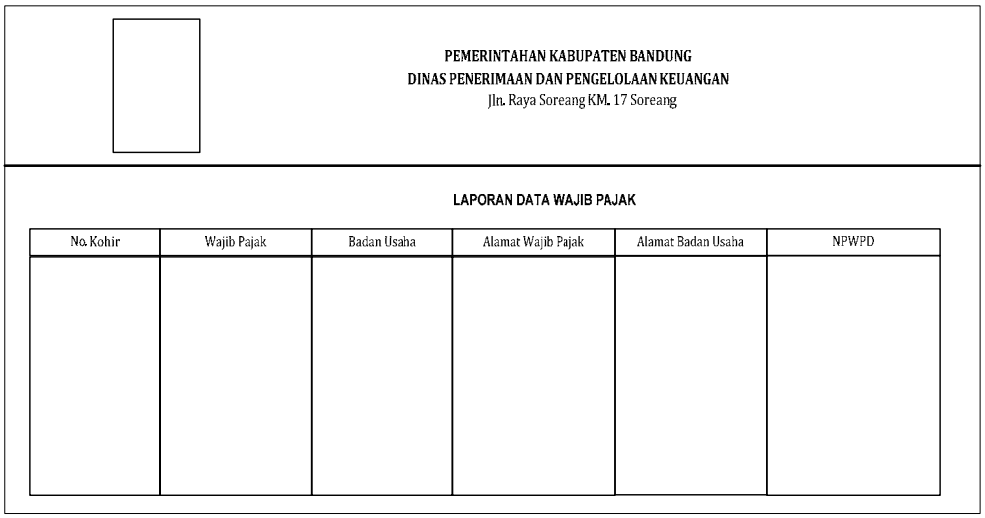
Kepala Bendahara Penerima

(.....)
NIP.

Gambar 4.37 Perancangan Output Laporan Penyetoran

Perancangan output laporan penyetoran ini didapat dari input data laporan penyetoran, yang akan diarsipkan oleh Bagian Bendahara Penerima dan oleh beberapa bagian lainnya.

5. Perancangan Output Laporan Data Wajib Pajak


PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang

LAPORAN DATA WAJIB PAJAK

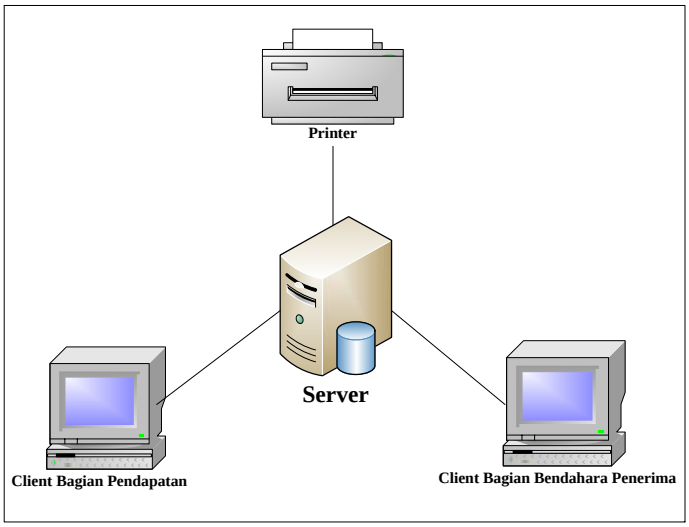
No. Kohir	Wajib Pajak	Badan Usaha	Alamat Wajib Pajak	Alamat Badan Usaha	NPWPD

Gambar 4.38 Perancangan Output Laporan Data Wajib Pajak

Perancangan output laporan data wajib pajak ini merupakan daftar wajib pajak yang akan membayar pajak. Dari laporan ini dapat diketahui wajib pajak mana saja yang sudah dan yang belum membayar pajak.

4.2.6. Perancangan Arsitektur Jaringan

Sistem ini dibuat secara *client server* yang hanya dapat dilakukan oleh administrator yaitu Bagian Bendahara Penerima dan Bagian Pendapatan sebagai *client, servernya* yaitu yang membawahi Bagian Bendahara Penerima dan Bagian Pendapatan.



Gambar 4.39 Rancangan arsitektur jaringan

Perangkat lunak ini menggunakan topologi jenis *Ring Network* untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Topologi *Ring* biasa digunakan untuk LAN (*Local Area Network*) dengan jumlah komputer yang terhubung sedikit. Topologi jaringan ring (*Ring Network*) ini tidak terpusat pada induk komputer, sehingga kalau salah satu komputer tidak berfungsi tidak akan mengganggu komputer yang lain. Adapun alat bantu dalam arsitektur jaringan ini menggunakan kabel UTF dengan metode pengkabelan cross.